



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI DOMESTIK DI SUMATERA BARAT

TESIS



METRI

0921206033

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Domestik di Sumatera Barat

Oleh :

Metri

(Di bawah bimbingan Dr. Indrawari, SE, MA dan Prof. Dr. Sofyardi, SE, MA)

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari tingkat suku bunga, produk domestik regional bruto/PDRB, investasi pemerintah dan krisis ekonomi terhadap investasi domestik di Sumatera Barat dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2008.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat dari tahun 1990 - 2008. Selain itu digunakan juga data-data lain yang bersumber dari berbagai laporan instansi pemerintah propinsi Sumatera Barat dan Bank Indonesia wilayah Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan variable-variabel yang digunakan didalam analisis ini adalah nilai investasi domestik sebagai variabel terikat, suku bunga, PDRB, investasi pemerintah dan krisis ekonomi sebagai variabel bebas. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi investasi domestik di Sumatera Barat adalah metode regresi linier berganda.

Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat suku bunga, dan krisis ekonomi secara bersamaan berpengaruh terhadap investasi domestik di Sumatera Barat. Secara individual hasil pengujian menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap investasi domestik, PDRB berpengaruh positif terhadap investasi domestik di Sumatera Barat, dilain pihak investasi pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan variabel PDRB sehingga harus dikeluarkan dari model, krisis ekonomi (*dummy*) tidak mempunyai pengaruh negatif yang kuat terhadap investasi domestik di Sumatera Barat.

Beberapa implikasi kebijakan dari hasil analisis ini adalah pemerintah perlu menetapkan perkembangan pertumbuhan PDRB sebagai salah satu faktor penentu investasi domestik di Sumatera Barat, menjaga kestabilan tingkat suku bunga supaya tidak terjadi pelarian modal, serta memaksimalkan peran pemerintah sebagai penentu arah pembangunan.

PERNYATAAN KEASLIAN THESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi thesis yang saya tulis dengan judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Domestik di Sumatera Barat adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Agustus 2010

Yang Membuat Pernyataan

METRI

BP. 09 212 06 033



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Nagari Tanjung, Sungayang Batusangkar pada tanggal 14 Maret 1979 merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M. Lini YS dan Ibu Syofinah, Penulis sudah memiliki suami dengan nama Ances Kurniawan, SSTP dan sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Syerliviona Hayunda dan Satria Antares.

Penulis menamatkan pendidikan SD pada tahun 1991, SMP tahun 1994, SMA tahun 1997 di Batusangkar. Pada tahun 2002 penulis memperoleh gelar Sarjana Teknik pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang Sumatera Barat.

Penulis mulai bekerja pada tahun 2002 diangkat sebagai PNS pada Bappeda Kota Padang. Tahun 2009 penulis memperoleh kesempatan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang strata 2 dengan program studi Perencanaan Pembangunan pada program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang dengan beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas.

Demikianlah riwayat hidup ini penulis dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI DOMESTIK DI SUMATERA BARAT”, ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Master Sains pada Pascasarjana Universitas Andalas.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas yang telah berkenan memberikan beasiswa dalam melanjutkan pendidikan pada program S2 Pascasarjana Universitas Andalas Padang pada program studi Perencanaan Pembangunan. Kemudian kepada Bapak Walikota Padang, Kepala Bappeda Kota Padang, Kepala BKD Kota Padang yang telah memberikan izin tugas belajar kepada penulis.

Dalam menyelesaikan thesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Indrawari, SE, MA dan Bapak Prof. Dr. H. Sofyardi, SE, MA selaku komisi pembimbing yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan thesis ini
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc selaku Direktur Pascasarjana Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr.H. Firwan Tan, SE, M.Ec, DEA, Ing selaku ketua Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Universitas Andalas

4. Bapak Prof. Dr. Sjafrizal, SE, MA dan Bapak Prof. Dr. Nasri Bachtiar, SE, MS selaku dosen penguji dan Seluruh Dosen dan Karyawan Pascasarjana Universitas Andalas.
5. Instansi pemerintah tempat penulis melakukan penelitian yaitu kantor BKPMD, Bappeda, BPS dan Bank Indonesia, terimakasih atas dukungan dan datanya.
6. Teristimewa kepada Ayahanda M. Lini YS dan Ibu Syofinah serta Suami tersayang Ances Kurniawan dan anak-anak tercinta Syerliviona Hayunda dan Satria Antares yang telah memberikan dukungan moril serta mengiringi do'a sepenuhnya kepada penulis untuk keberhasilan studi ini.
7. Kakak-kakakku, mertua, keponakan dan seluruh saudara-saudaraku
8. Teman-teman seperjuangan PPN Tailor Made Angkatan VI yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan disini mohon maaf dan terimakasih banyak atas dukungannya.

Akhir kata penulis berharap semoga thesis ini dapat bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Terima kasih.

Padang, Agustus 2010

Penulis,

METRI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN LITERATUR	 9
2.1. Pengertian Investasi	9
2.2. Teori Investasi	11
2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi	15
2.4. Pentingnya Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi	20
2.5. Sebab-Sebab Kurangnya Investasi di Indonesia	22
2.6. Penelitian Terdahulu	22
2.7. Hipotesis	25
 BAB III KERANGKA TERORI DAN METODOLOGI PENELITIAN	 26
3.1. Kerangka Teori	26
3.2. Metodologi Penelitian	32
3.2.1 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.2.2 Jenis dan Sumber Data	32
3.2.3 Jenis Penelitian	33
3.2.4. Defenisi Operasional	33
3.2.5. Teknik Analisis Data	34
 BAB IV GAMBARAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT	 36
4.1 Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota	36
4.2 Demografi dan Angkatan Kerja	37
4.3 Prioritas Pembangunan Sumatera Barat	39
4.4 Kondisi Perekonomian Sumatera Barat	40
4.5 PDRB Perkapita	43
4.6 Perkembangan Investasi Domestik	44
4.7 Perkembangan tingkat suku bunga dan laju inflasi	47
4.8 Perkembangan Investasi Pemerintah	49
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	 52
5.1. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis	52
5.2. Hasil Penemuan Empiris	52

5.3. Analisis Uji Statistik	64
5.4. Analisis Uji Asumsi Klasik	66

BAB VI STRATEGI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	71
-----------------------------------------------	----

BAB VII KESIMPULAN	81
--------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

LAMPIRAN

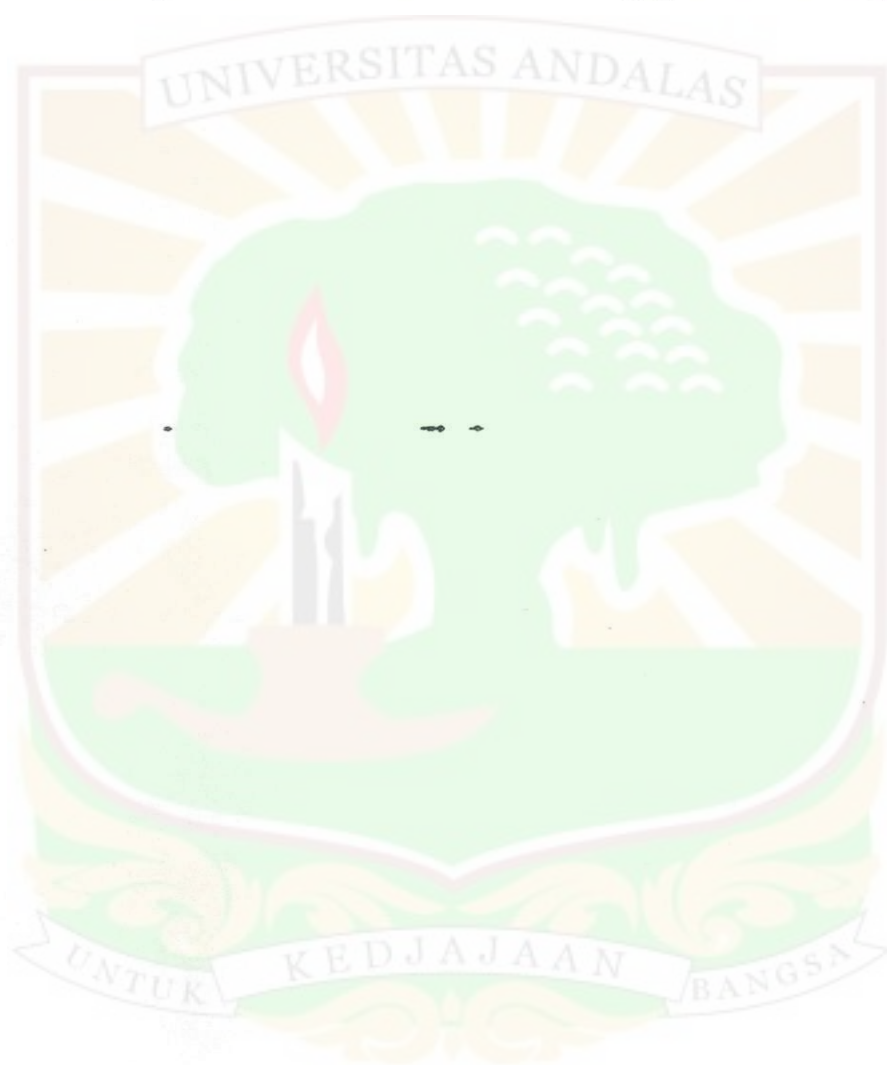


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Nama Daerah Kabupaten dan Kota dan Jumlah Kecamatan se-Sumatera Barat Tahun 2008	36
Tabel 4.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2008.....	38
Tabel 4.3 Penduduk Propinsi Sumatera Barat Berumur 15 Tahun keatas menurut Jenis Kegiatan Tahun 2008	39
Tabel 4.4 Jumlah Angkatan Kerja Propinsi Sumatera Barat yang Bekerja Menurut lapangan Usaha Tahun 2007-2008	39
Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan PDRB Propinsi Sumatera Barat tahun 1990-2008 berdasarkan harga konstan tahun 2000	41
Tabel 4.6 PDRB Perkapita Propinsi Sumatera Barat Tahun 1990-2008 berdasarkan harga konstan tahun dasar 2000	44
- - -	
Tabel 4.7 Persetujuan dan Realisasi Inestasi Dimestik di Propinsi Sumatera Barat Tahun 1990-2008	46
Tabel 4.8 Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit dan Laju Inflasi Tahun 1990-2008	48
Tabel 4.9 Perkembangan Investasi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam Bidang Pembangunan Tahun 1990-2008	50
Tabel 5.1 Estimasi Variabel Terhadap Investasi Domestik	53
Tabel 5.2 Hasil Uji Multikoleniaritas	54
Tabel 5.3 Koefisien Korelasi Parsial.....	54
Tabel 5.4 Estimasi Variabel terhadap Investasi Domestik sebagai Solusi masalah multikoleniaritas	55

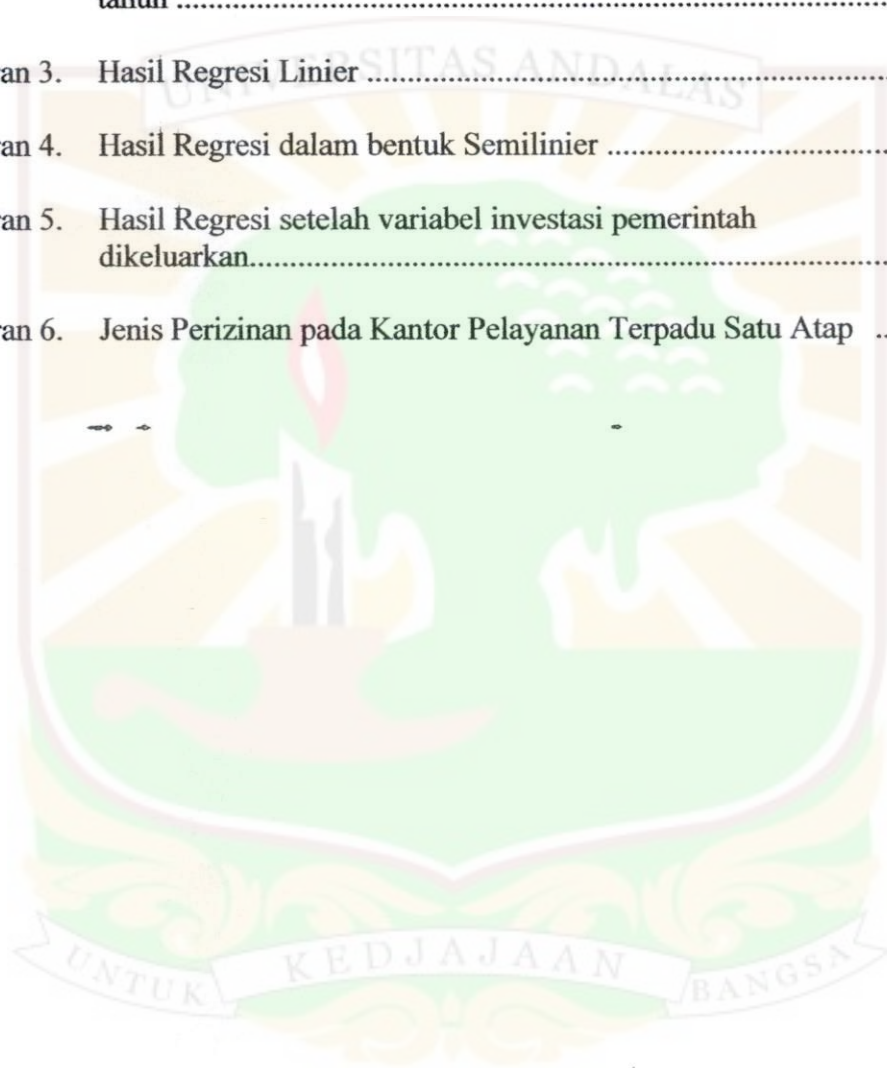
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 5.1 Hasil Uji Durbin Watson Test	67
Gambar 5.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	68



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. PDRB Propinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 1990- 2008 berdasarkan harga konstan tahun	86
Lampiran 2. Laju Pertumbuhan PDRB Propinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 1990- 2008 berdasarkan harga konstan tahun	87
Lampiran 3. Hasil Regresi Linier	88
Lampiran 4. Hasil Regresi dalam bentuk Semiliniier	93
Lampiran 5. Hasil Regresi setelah variabel investasi pemerintah dikeluarkan.....	97
Lampiran 6. Jenis Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap	102



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membalikkan posisi Indonesia menjadi negara dengan kondisi perekonomian yang parah dan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Krisis ini awalnya dipicu oleh memburuknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kondisi ini membuat pokok maupun bunga pinjaman yang harus dibayar para investor yang menggunakan modal pinjaman luar negeri, meningkat tajam. Bahkan beberapa industri skala besar yang memiliki investasi dengan kandungan impor yang tinggi terpaksa gulung tikar.

Investasi merupakan komponen dari permintaan agregat kedua terbesar setelah konsumsi, namun relatif sulit untuk diperhitungkan karena bersifat *volatile* atau lebih tidak stabil bila dibandingkan dengan konsumsi swasta. Resesi ataupun *boom* dalam suatu perekonomian bisa terjadi akibat perilaku investasi. Investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan bagi produktivitas kerja. Tanpa investasi maka tidak akan ada ekspansi usaha. Turunnya pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh turunnya pengeluaran untuk investasi. Oleh karena itu, perilaku investasi penting untuk diketahui guna merumuskan kebijakan stabilisasi dalam usaha meminimalkan pengaruh buruk fluktuasi investasi terhadap perekonomian (Putu, 2008).

Investasi memang tidak dapat dipisahkan dengan pinjaman, dan pinjaman selalu berkaitan dengan bunga. Tingkat suku bunga diyakini oleh para ekonom

sebagai salah satu determinan investasi. Hal ini menyangkut biaya investasi (*cost of investment*) yang harus ditanggung investor. Semakin besar biaya investasi maka akan semakin kecil keuntungan (*profitability*) yang diperoleh investor, akibatnya semakin kecil minat untuk berinvestasi. Hal ini dibuktikan dengan melambungnya tingkat suku bunga (26,20%) pada masa krisis yang menyebabkan menurunnya investasi domestik turun hampir 50% pada tahun 1999 di propinsi Sumatera Barat (BPS, 2000).

Dalam memperhitungkan nilai keuntungan, disamping mempertimbangkan tingkat suku bunga, investor juga harus mempertimbangkan seberapa besar permintaan terhadap barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam investasinya. Secara teoritis, besar kecilnya permintaan terhadap barang dan jasa sangat bergantung pada kuat lemahnya daya beli masyarakat, yang tercerminkan oleh besar kecilnya pendapatan riil. Dalam perekonomian Sumatera Barat pendapatan ini biasanya dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB). Meningkatnya permintaan ini akan mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga umum atau mengakibatkan adanya inflasi (Putu, 2008).

Di Propinsi Sumatera Barat, hingga saat ini banyak sekali faktor-faktor yang sebagian besar saling terkait satu sama lainnya dengan pola yang sangat kompleks yang menyebabkan lambatnya pemulihan investasi. Secara umum persoalan investasi di Sumatera Barat adalah rendahnya pertumbuhan investasi, baik PMA maupun PMDN. Keadaan ini juga sejalan dengan rendahnya investasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Sementara investasi pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta baik melalui APBN maupun APBD melalui pembangunan infrastruktur publik. Permasalahan ini membatasi kekuatan

investasi dalam mendorong dan mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara spesifik permasalahan investasi daerah bersumber dari iklim investasi yang tidak kondusif dan tidak menarik bagi investor (Bappeda, 2005). Menurut hasil penelitian survei yang dilakukan Bank Indonesia (2005), iklim investasi yang tidak kondusif disebabkan oleh tiga kendala yaitu kendala ekonomi (30,53%), kendala politik (12,63%) dan kendala kelembagaan (56,84%). Besarnya persentase kendala kelembagaan ini disebabkan oleh masalah prosedur perizinan rumit (18,95%), pungutan liar (12,63%), aturan tentang kelangsungan usaha belum ada (10,53%) dan masalah aturan tanah ulayat (4,21%). Menurut hasil penelitian *Work Bank* tahun 2004, alasan utama mengapa investor khawatir untuk melakukan investasi di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakstabilan kebijakan, korupsi, perijinan usaha dan regulasi pasar tenaga kerja.

Agar mampu mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi secara cepat dan terus menerus, baik dalam tataran internasional pada umumnya maupun nasional khususnya, maka kesiapan seluruh *stakeholders* baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat diperlukan untuk mengantisipasi kondisi ini. Terkait dengan hal tersebut faktor-faktor ekonomi seperti tingkat suku bunga, PDRB, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, infrastruktur dasar berpengaruh terhadap kegiatan investasi (LPER Sulsel, 2007). Khusus untuk program pengembangan investasi, dalam jangka pendek kebijakan diarahkan untuk menurunkan hambatan prosedural dan permasalahan likuiditas dan memperluas investasi nonkuota. Dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pengembangan investasi, dan menjaga stabilitas makro ekonomi (Bappeda, 2005).

Dewasa ini kesempatan berinvestasi di Sumatera Barat semakin terbuka, dimana selama ini Sumatera Barat telah mempromosikan diri sebagai tempat berinvestasi yang paling aman, apalagi dengan keterbukaan yang dilihatkan

sekarang ini oleh Gubernur dengan membuka diri untuk menarik masuknya investor baru ke Sumatera Barat. Disamping dalam rangka menarik investasi langsung, keterbukaan ini sejalan pula dengan era perdagangan bebas yang akan dihadapi mulai tahun 2020 kelak. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 6/Tahun 1968 jo. No. 12/Tahun 1970 tentang investasi domestik, investasi cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 laju pertumbuhan rata-rata mencapai 35,1%. Walaupun demikian, pada tahun-tahun tertentu sempat terjadi penurunan terutama pada tahun 1999, tingkat penurunannya hampir mencapai 45%. Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, total investasi bertumbuh sekitar 12% per tahun (berdasarkan harga berlaku). Sedangkan berdasarkan harga konstan pertumbuhan ini diperkirakan sekitar 2,88% per tahun. Dimana investasi yang dilakukan pemerintah selama periode tersebut mempunyai kontribusi sebesar 11,82%, sedangkan investasi yang bersumber dari pihak swasta mempunyai kontribusi sebesar 88,18% (BKPM Sumbar, 2007).

Investasi merupakan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Peranan investasi di Sumatera Barat cenderung meningkat sejalan dengan banyaknya dana yang di butuhkan untuk melanjutkan pembangunan daerah. Investasi merupakan suatu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dari uraian di atas, pokok permasalahan yang menjadi pembahasan utama dari tulisan ini adalah iklim investasi yang sangat kompleks, yang implikasinya adalah bahwa kebijakan investasi tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, bagaimanapun bagus suatu kebijakan investasi, efektivitas dari kebijakan tersebut akan tergantung pada banyak faktor di luar wilayah kebijakan investasi, karena faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi keputusan

seseorang untuk melakukan investasi atau membuka usaha baru di Sumatera Barat. Maka penulis dalam penelitian ini akan mengambil judul “*FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI DOMESTIK DI SUMATERA BARAT*”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah perkembangan investasi domestik di Sumatera Barat periode tahun 1990 s/d 2008?
2. Apakah Tingkat suku Bunga Riil, PDRB Riil, Investasi Pemerintah dan Krisis Ekonomi berpengaruh terhadap investasi domestik di Sumatera Barat?
3. Implikasi kebijakan apakah yang diperlukan dalam peningkatan iklim investasi domestik yang kondusif di Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan perkembangan investasi domestik di Sumatera Barat pada tahun 1990 - 2008.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi domestik di Sumatera Barat tahun 1990 - 2008.
3. Merumuskan alternatif implikasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, berdasarkan

hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi domestik pada point 2 diatas.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuktikan teori-teori tentang investasi yang sudah ada.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Propinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai tambahan informasi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi turun naiknya investasi di Sumatera Barat, maka agar permasalahan tidak meluas, penelitian ini membatasi pembahasannya pada investasi domestik khususnya penanaman modal dalam negeri. Periode yang diteliti adalah pada tahun 1990 sampai dengan 2008, karena pada periode tersebut investasi khususnya penanaman modal dalam negeri di Sumatera Barat mengalami perubahan yang sangat drastis akibat dampak dari krisis moneter pada tahun 1998 sampai saat ini. Selain itu karena keterbatasan ketersediaan data tentang faktor-faktor kelembagaan yang mempengaruhi iklim investasi yang tidak kondusif, maka penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor ekonominya saja khususnya makro ekonomi.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang deskripsi dan latar belakang masalah investasi di Sumatera Barat, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Literatur

Bagian ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendasari dan relevan dengan penelitian ini, dan mengkaji hasil penelitian yang pernah ada yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan perumusan hipotesa.

Bab III Kerangka Teori Dan Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang uraian kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini. Bagian ini juga berisi tentang data, sumber data, dan metode perhitungan serta model pengujian yang akan dilakukan terhadap data-data yang diperoleh.

Bab IV Gambaran Umum Propinsi Sumatera Barat

Berisi tentang gambaran secara umum tentang kondisi perekonomian daerah yang akan diteliti yaitu Propinsi Sumatera Barat.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Pengertian Investasi

Dalam konsep ekonomi makro, penimbunan/penumpukan modal selalu dianggap sebagai investasi. Secara fisik pengertian modal adalah seluruh peralatan dan prasarana fisik yang digunakan dalam proses produksi, seperti tanah, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Dalam konsep *Incremental Output Ratio (ICOR)*, investasi adalah total dari pembentukan modal tetap dan stok barang yang terdiri atas gedung, mesin dan perlengkapan, kendaraan, dan sebagainya (BPS, 2008).

Investasi dapat dibagi atas dua bagian, pertama, *public investment* yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembuatan jalan raya, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Kedua, *private investment* yaitu investasi yang dilakukan pihak-pihak swasta, seperti pembuatan pabrik baru atau penambahan faktor-faktor produksi baru (Lains, 1994). Menurut BPS, investasi menurut institusi dibagi menjadi investasi pemerintah, investasi swasta dan investasi rumah tangga. Investasi swasta terdiri dari penanaman modal asing (PMA)/ *Foreign Direct Investment* dan penanaman modal dalam negeri (PMDN)/ *Domestic Investment* (BPS, 2008).

Secara statistik, investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi, dapat dibedakan atas 4 (empat) komponen, yaitu : investasi perusahaan-perusahaan swasta, pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal, perubahan dalam inventaris (persediaan) perusahaan dan investasi yang dilakukan pemerintah (Sukirno, 2000).

Investasi perusahaan merupakan komponen terbesar dari investasi dalam suatu negara, sehingga sering menjadi perhatian para ekonomi dalam membuat analisis mengenai investasi. Komponen yang paling kecil dari investasi adalah investasi atas inventaris (persediaan), yaitu stok barang yang disimpan oleh perusahaan. Barang-barang yang digolongkan sebagai persediaan meliputi bahan mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi yang masih disimpan digudang.

Komponen terakhir dari investasi adalah investasi pemerintah. Jenis investasi ini berbeda dengan investasi perusahaan yang pada dasarnya adalah investasi untuk mencari keuntungan, sedangkan investasi pemerintah didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu investasi pemerintah ini disebut juga sebagai investasi sosial, karena kebanyakan investasi pemerintah digunakan untuk menciptakan modal tetap sosial. Sebagai contoh adalah investasi untuk membangun jalan raya, pelabuhan, irigasi, bangunan sekolah dan lain-lain. Investasi merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan investasi akan membuka lapangan kerja baru. Oleh sebab itu investasi sangat diperlukan di negara berkembang, karena dapat menyerap tenaga kerja sehingga akan mengurangi pengangguran. Berkurangnya angka pengangguran secara tidak langsung tentu akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang menunjukkan telah terjadi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, dan menaikkan pendapatan nasional (Todaro, 2003).

2.2. Teori Investasi

Dalam perkembangan teoritisnya dikenal beberapa teori investasi antara lain :

a. Teori Investasi Klasik

Seperti yang dikatakan ahli ekonomi klasik Adam Smith dalam Jinhuan (2002) bahwa pemupukan modal merupakan satu syarat mutlak dalam pembangunan ekonomi, dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanamkan modalnya. Karena itu tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan. Sehingga tingkat tabungan dan investasi ditentukan oleh tingkat suku bunga. Perubahan-perubahan dalam tingkat suku bunga akan menyebabkan tabungan yang setara pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan investasi yang dilakukan pengusaha. Karena itu tingkat investasi klasik dapat dituliskan seperti berikut :

$$I = I(r)$$

dimana I adalah Investasi, dan r adalah tingkat bunga.

b. Teori Investasi Keynesian

Menurut Keynesian besarnya tabungan yang dilakukan rumah tangga tidak tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga. Tetapi tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga yang bersangkutan. Makin besar jumlah pendapatan rumah tangga, makin besar pula jumlah tabungan yang dilakukan (Sukirno, 2000). Disamping itu Keynes tidak yakin bahwa jumlah investasi yang dilakukan pengusaha sepenuhnya ditentukan oleh

pendapatan, keadaan ekonomi masa lalu, ramalan perkembangan ekonomi masa depan dan perkembangan teknologi (Sukirno, 2000).

Keynesian mencoba menformulasikan teori investasi, dimana untuk melakukan investasi perlu membandingkan tingkat bunga yang berlaku dengan *Marginal Efficiency of Investment (MEI)*. Teori ini dikenal juga dengan *The Rational Investment Decision*, dimana dari setiap investasi yang dilakukan diharapkan adanya suatu aliran yang positif. Maka secara rasional investasi hanya akan dilakukan apabila MEI lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku.

Pendekatan MEI yang dikemukakan Keynesian ini merupakan pendekatan *Marginal Efficiency of capital (MEC)* yang telah memperhitungkan perubahan harga barang modal. Implikasi dari teori ini adalah terdapat hubungan negatif antara tingkat bunga dengan investasi. Bila keuntungan yang diharapkan MEC lebih besar dari tingkat bunga maka investasi akan dilakukan, begitu juga sebaliknya, jika MEC lebih kecil dari tingkat bunga maka investasi tidak dilaksanakan. Dan jika MEC sama dengan tingkat bunga maka investasi boleh dilaksanakan atau boleh tidak dilaksanakan (Sukirno, 2000).

Konsep *Marginal Efficiency of Capital*

Dalam teori makro Keynes keputusan untuk melakukan investasi ditentukan oleh perbandingan antara besarnya keuntungan yang diharapkan (yang dinyatakan dalam persentase satuan waktu) dengan biaya penggunaan dana atau tingkat bunga. Apabila tingkat bunga yang berlaku di pasar uang sebesar 2% setiap bulan (atau 24% setahun), sedangkan keuntungan yang diharapkan sebesar 50% maka investasi tersebut masih menguntungkan karena keuntungan (kotor)

yang di harapkan melebihi ongkos pendanaan. Maka jika pengusaha tersebut “rasional” investasi tersebut akan dilaksanakan Secara ringkas :

1. Jika keuntungan yang diharapkan (*MEC*) lebih besar dari pada tingkat bunga, maka investasi di laksanakan.
2. jika *MEC* lebih kecil dari pada tingkat bunga maka investasi tidak dilaksanakan.
3. Jika *MEC*= tingkat bunga maka investasi bisa di laksanakan dan bisa juga tidak

c. Teori Investasi Neo Klasik

Perkembangan teori investasi selanjutnya oleh para ekonom aliran Keynesian dan Neo Klasik tidak lagi menitikberatkan pada variabel tingkat bunga sebagai variabel yang mempengaruhi investasi. Teori investasi Neo Klasik menyatakan bahwa untuk mendapatkan suatu persamaan investasi yang lebih realistis, digunakan variabel pendapatan nasional. Sementara itu teori investasi Keynesian menyatakan bahwa pendapatanlah yang mempengaruhi investasi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa investasi tergantung pada perubahan pendapatan, inilah yang disebut *Acceleration Principle*. Teori yang berhubungan dengan perubahan pendapatan, dimana investasi cenderung meningkat apabila terjadi perubahan tingkat pendapatan yang positif, dapat ditulis :

$$I = f(\Delta Y)$$

dimana *I* adalah Investasi dan ΔY adalah perubahan pendapatan.

Dari uraian di atas, di ketahui bahwa tingkat pengeluaran investasi di tentukan oleh dua hal yaitu tingkat suku bunga yang berlaku dan *marginal efficiency of capital*. Perilaku makro para investor ini biasanya diringkas dalam

satu bentuk fungsi *marginal efficiency of capital* atau fungsi investasi. Tiga hal yang perlu di garis bawahi mengenai fungsi investasi : pertama, fungsi tersebut mempunyai slope yang negatif, artinya semakin rendah tingkat bunga semakin besar pula tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan. Kedua, dalam kenyataan fungsi tersebut sulit untuk di peroleh sebab posisinya sangat tidak stabil (mudah berubah dalam jangka waktu yang sangat singkat). Kelebihan fungsi investasi ini akan segera dapat dipahami karena posisinya sangat tergantung pada nilai MEC dari proyek-proyek yang ada dan bahwa MEC adalah keuntungan yang di harapkan oleh investor. Ketiga, yang perlu ditekankan adalah hubungan teori Keynes dengan kenyataan, khususnya masalah tersedianya dana investasi.

d. Teori Harrod-Domar tentang investasi

Teori investasi Harrod-Domar merupakan teori makro investasi dalam jangka panjang. Menurut Harrod-Domar pengeluaran investasi mempunyai proses multiplier terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Setiap ada peningkatan stok capital masyarakat, meningkatkan pola kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output potensial. Hubungan antara stok capital dengan output potensial merupakan hubungan ekonomis secara langsung yang di sebut *capital output ratio (COR)*. Harrod-Domar menitik beratkan bahwa akumulasi capital mempunyai peranan ganda yaitu menimbulkan pendapatan dan memperbesar persediaan kapital.

2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi

Dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, para ekonom memiliki pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi investasi.

a. Tingkat Suku Bunga

Investasi dapat bersumber dari internal perusahaan maupun eksternal, seperti laba yang ditahan ataupun pinjaman dari lembaga keuangan. Dana investasi yang diperoleh dari lembaga keuangan biasanya bersumber dari tabungan masyarakat. Maka lembaga keuangan tersebut harus membayar bunga tabungan pada masyarakat penabung. Menurut kaum klasik antara tabungan dan investasi akan menghasilkan tingkat suku bunga pasar.

Wijaya (2000) menjelaskan bahwa pengaruh tingkat suku bunga terhadap besarnya pengeluaran investasi suatu masyarakat, baik menggunakan pendekatan sederhana atau yang lebih kompleks menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu investasi merupakan fungsi tingkat suku bunga. Dalam arti bahwa meningkatnya tingkat bunga (r) mengakibatkan berkurangnya pengeluaran untuk investasi, dan sebaliknya menurunnya tingkat suku bunga akan mengakibatkan bertambahnya pengeluaran untuk investasi.

Dalam bentuk grafik, hubungan yang negatif antara tingkat suku bunga dengan pengeluaran investasi dapat diungkapkan sebagai kurva permintaan investasi. Persamaan kurvanya dituliskan sebagai berikut :

$$I = I_0 - hr$$

di mana I adalah pengeluaran investasi, I_0 adalah investasi *autonomous* atau investasi yang direncanakan yang tidak tergantung pada tingkat suku bunga (biasanya I_0 dicerminkan oleh pengeluaran investasi pemerintah), h adalah parameter yang mengukur sensitivitas investasi yang direncanakan terhadap tingkat suku bunga, dan r adalah tingkat bunga. Slope dari kurva ini adalah $-1/h$.

Dalam hal tingkat suku bunga, dikenal adanya tingkat suku bunga nominal dan riil. Tingkat suku bunga nominal yang tinggi seringkali disertai dengan laju inflasi yang juga tinggi, sehingga ketika seseorang membayar kembali pinjaman disertai bunga yang tinggi maka sebenarnya nilai uangnya telah mengalami penurunan. Perubahan tingkat harga umum diukur dengan indeks harga atau laju inflasi yang akan menyebabkan perbedaan nilai variabel pada harga nominal dan pada harga riil. Untuk itu proses pendeflasi dengan menggunakan angka laju inflasi perlu dilakukan (Wijaya, 1999).

Tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang nilainya ditetapkan oleh bank, sedangkan untuk menghitung tingkat suku bunga riil maka tingkat suku bunga nominal tadi harus dikurangi dengan angka laju inflasi (Wijaya, 1999), atau dituliskan dalam bentuk rumus:

$$r = i - \pi$$

di mana r adalah tingkat suku bunga riil, i adalah tingkat suku bunga nominal dan π adalah angka laju inflasi.

b. Pendapatan Regional

Pendekatan investasi model akselerator merupakan salah satu konsep investasi yang menjelaskan bahwa besarnya investasi adalah proporsional/

sebanding dengan perubahan pendapatan dan adanya suatu penyesuaian dari nilai stok kapital aktual menuju stok kapital yang diinginkan. Ada dua model akselerator yaitu akselerator sederhana dan model akselerator fleksibel. Model akselerator sederhana beranggapan bahwa COR konstan, stok kapital yang diinginkan berhubungan konstan dengan pendapatan. Stok kapital selalu disesuaikan dengan yang diinginkan.

Model tersebut memiliki kelebihan yaitu tidak perlu lagi mengukur stok kapital yang datanya sulit diperoleh. Namun kelemahannya berada pada asumsi COR konstan. Hal ini disebut juga *Induced Investment* atau investasi yang terjadi akibat perubahan pendapatan (Y_d). Hubungan antara pendapatan dan investasi yang dilakukan masyarakat adalah positif, artinya jika pendapatan (Y_d) meningkat akan menciptakan keuntungan yang dapat digunakan untuk pembiayaan investasi baru. Sesuai dengan teori akselerasi, teori investasi Neo Klasik juga berpendapat bahwa pendapatan nasional yang semakin meningkat akan meningkatkan daya beli masyarakat dan secara langsung juga meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Peningkatan permintaan ini memerlukan investasi dalam jumlah yang besar pula. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional mempunyai hubungan positif dengan investasi. Dernburg (1981) dan Allen (1967) juga mengatakan bahwa investasi dipengaruhi oleh tingkat output yang ingin dihasilkan pada waktu tertentu (Firmansyah, 2008).

Reksoprayitno (2000) menjelaskan bahwa investasi merupakan fungsi dari pendapatan nasional, atau dirumuskan sebagai:

$$I = I_0 + \alpha Y$$

di mana I adalah jumlah pengeluaran investasi, I_0 jumlah pengeluaran investasi pada tingkat pendapatan nasional sebesar nol, $\alpha = \Delta I / \Delta Y = \text{marginal propensity to invest}$, dan Y adalah pendapatan nasional.

Positifnya hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran investasi didasarkan pada asumsi rasionalitas. Dengan asumsi ini produsen hanya mau mengadakan investasi selama proyek investasi tersebut diperkirakan akan mendatangkan keuntungan. Salah satu faktor perkiraan keuntungan itu adalah adanya permintaan akan barang atau jasa yang akan dihasilkan, dan besarnya jumlah permintaan tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan maka sampai pada satu titik tertentu akan makin tinggi pula permintaan terhadap barang atau jasa.

c. Investasi Pemerintah dan Infrastruktur Publik

Pengeluaran investasi Pemerintah merupakan pengeluaran untuk membeli barang dan jasa dengan tujuan untuk menyediakan infrastruktur sarana prasarana umum bagi masyarakat. Dalam melakukan investasi, investor selalu memperhitungkan mengenai ketersediaan infrastruktur publik yang dapat mendukung kelancaran aktivitas produksi dan penjualan dari *output* yang nantinya dihasilkan di lokasi di mana investasi direncanakan akan dilakukan. Infrastruktur publik yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi oleh para investor dapat berupa infrastruktur pengangkutan (*transport infrastructure*) seperti jalan, pelabuhan, dan rel kereta api, atau dapat pula berupa keperluan (*utilities*) seperti listrik, telepon, dan air bersih. Beberapa infrastruktur publik yang tidak tersedia atau walaupun tersedia namun kondisinya tidak memadai di

suatu daerah, dapat disediakan sendiri oleh investor dengan cara menyediakan modal komplementer. Namun tidak demikian halnya dengan infrastruktur publik yang merupakan infrastruktur pengangkutan, infrastruktur ini tidak dapat dengan mudah disediakan oleh investor melalui penyediaan modal komplementer (Reinikka dan Svensson, 1999).

Penyediaan infrastruktur pengangkutan memerlukan biaya yang sangat besar dan jika penyediaannya menggunakan modal komplementer maka akan membuat sebagian besar modal investasi yang direncanakan menjadi tidak produktif. Akibatnya jelas, ekspektasi keuntungan juga makin kecil. Dengan demikian ketidaktersediaan atau kurang memadainya kualitas infrastruktur publik yang berupa infrastruktur pengangkutan akan mengurangi minat investasi para investor di suatu daerah. ~

Seperti dilakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain. Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Melihat perkembangan makro-ekonomi saat ini, terutama memperhatikan kecenderungan penurunan tingkat bunga, untuk saat ini pembiayaan rupiah masih merupakan alternatif yang lebih baik. Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan

infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat .

2.4. Pentingnya Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi

Persediaan modal adalah determinan *output* perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah kepada pertumbuhan ekonomi. Biasanya, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang (Mankiw, 2003). Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan, dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal (*capital stock*) suatu negara (yaitu jumlah nilai riil bersih dari semua barang-barang modal produktif) sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat *output* yang lebih besar. Investasi jenis ini sering diklasifikasikan sebagai investasi di sektor produktif (*directly productive activities*). Investasi-investasi lainnya yang dikenal dengan sebutan infrastruktur sosial dan ekonomi (*social overhead capital*) yaitu jalan raya, listrik, air, sanitasi, dan komunikasi akan mempermudah dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi (Lincoln Arsyad, 1999).

Selain itu, ada juga investasi tidak langsung. Pembangunan fasilitas-fasilitas irigasi akan dapat memperbaiki kualitas lahan pertanian melalui peningkatan produktivitas per hektar. Jika 100 hektar lahan beririgasi bisa

menghasilkan output yang sama dengan 200 hektar lahan tak beririgasi (dengan catatan penggunaan input-input lainnya sama), maka fasilitas irigasi itu nilainya sama dengan dua kali luas lahan tanpa irigasi. Penggunaan pupuk-pupuk kimia dan pembasmian hama penyakit dengan pestisida juga akan bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas lahan. Semua bentuk investasi ini merupakan cara-cara untuk memperbaiki kualitas sumberdaya tanah yang ada. Sama halnya dengan investasi tak langsung di atas, investasi insani (*human investment*) juga dapat memperbaiki kualitas sumberdaya manusia dan juga akan mempunyai pengaruh yang sama atau bahkan lebih besar terhadap produksi. Sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah kejuruan, dan program-program latihan kerja serta berbagai pendidikan informal lainnya semuanya diciptakan secara lebih efektif untuk memperbesar kemampuan manusia dan sumberdaya-sumberdaya lainnya sebagai hasil dari investasi langsung dalam pembangunan gedung-gedung, peralatan dan bahan-bahan (buku-buku, proyektor, peralatan penelitian, alat-alat latihan kerja, mesin-mesin, dan lain-lain).

Latihan-latihan tingkat lanjutan yang relevan bagi tenaga pendidik, demikian pula dengan buku-buku pelajaran ekonomi yang baik, bisa membuat perubahan yang sangat besar dalam mutu, kepemimpinan, dan produktivitas tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu investasi insani sama dengan memperbaiki mutu sekaligus meningkatkan produktivitas sumberdaya-sumberdaya tanah melalui investasi yang strategis tersebut (Ibid, 1999).

Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah kapital. Investasi akan menambah jumlah daripada kapital. Tanpa investasi maka tidak akan ada pabrik/mesin baru, dan dengan demikian tidak ada ekspansi.

Pengertian investasi mencakup investasi barang-barang tetap pada perusahaan (*business fixed invesment*), persediaan (*inventory*) serta perumahan (*residential*) (Nopirin, 1987).

2.5. Sebab-Sebab Kurangnya Investasi di Indonesia

Tingkat inflasi yang terus menurun dan nilai tukar rupiah yang cenderung semakin menguat mendorong penurunan suku bunga. Lambatnya pemulihan tingkat kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia berkaitan dengan tingginya tingkat resiko usaha di dalam negeri. Tingginya tingkat resiko ini terutama berkaitan dengan hal-hal non-ekonomi, seperti lemahnya prasarana penegak hukum serta pengelolaan dunia usaha dan pemerintahan yang tidak transparan. Selain itu perkembangan di dalam negeri yang masih rawan terhadap gejolak sosial, dan keamanan ikut meningkatkan resiko usaha di Indonesia. Kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang meliputi plafon harga, kontrol impor, dan kecocokan seketika dari property swasta cenderung menghambat investasi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menarik investor dengan cara melakukan deregulasi dan debirokratisasi berupa kemudahan perizinan dan keleluasaan kepada investor serta insentif perpajakan (*tax holiday*). Upaya-upaya tersebut ditujukan untuk memperbaiki iklim usaha di dalam negeri sehingga dapat menarik investor dalam dan luar negeri (Case and Fair, 1999)

2.6. Penelitian Terdahulu

Ipumbu W. Shiimi dan Gerson Kadhikwa (1999), menganalisa tentang tabungan dan investasi di Namibia. Penelitian tersebut memfokuskan analisisnya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan dan investasi di Namibia,

yang meliputi tingkat suku bunga riil, tingkat inflasi, pendapatan (PDRB), dan investasi pemerintah terhadap investasi domestiknya dengan menggunakan metode *error correction model (ECM)*. Hasil dari penelitian tersebut adalah tabungan hanya dipengaruhi oleh pendapatan (PDRB), sedangkan tingkat suku bunga dan investasi pemerintah memberikan pengaruh yang kuat terhadap investasi.

Jamzami Sodik dan Didi Nuryadin (2005) dalam penelitian yang berjudul *Determinan Investasi di Daerah : Studi Kasus Propinsi di Indonesia*, dengan menggunakan metode *fixed effect* menemukan bahwa indikator-indikator yang signifikan terhadap pilihan lokasi berinvestasi adalah *market size* yakni PDRB, infrastruktur yakni listrik, dan tingkat keterbukaan ekonomi yakni ekspor. Dari ketiga indikator tersebut PDRB dan listrik signifikan dengan arah yang berlawanan dengan teori. Indikator tingkat keterbukaan perekonomian konsisten dengan teori.

Muslim (2005) menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi pada sektor industri (studi kasus industri pengolahan besar dan sedang di propinsi Sumatera Barat). Hasilnya adalah industri disektor pengolahan dipengaruhi secara positif oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan nilai output riil, sedangkan variabel tingkat bunga riil dan tingkat upah riil berpengaruh secara negatif. Variabel belanja pemerintah dibidang infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan investasi pada sektor industri di Sumatera Barat.

Irrene Silalahi (2002), menganalisis pengaruh investasi PMA dan PMDN terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Labuhan Batu dan hasil yang diperoleh adalah investasi yang masuk ke Kabupaten Labuhan Batu berpengaruh signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, namun berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Elita (2008), menganalisis kontribusi tenaga kerja dan investasi terhadap nilai produksi industri kecil di Sumatera Barat. Metode yang digunakannya adalah regresi linier. Hasilnya adalah semakin banyak tenaga kerja yang bekerja, maka semakin besar pula nilai produksi yang dihasilkan, namun peningkatan nilai produksi ini akan semakin tinggi jika kedua faktor produksi yang ada yaitu tenaga kerja dan investasi dapat ditingkatkan secara sekaligus.

Reinikka dan Svensson (1999) meneliti mengenai bagaimana penyediaan pelayanan dan infrastruktur publik mempengaruhi investasi swasta di Uganda.

Keduanya menggunakan model regresi linier sederhana yang diturunkan dari fungsi preferensi quasi-linier aliran kas perusahaan. Penelitian dilakukan terhadap 171 perusahaan yang dibedakan atas perusahaan yang menyediakan modal komplementer untuk memasang pembangkit listrik dan perusahaan yang tidak menyediakan modal komplementer. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada perusahaan yang memiliki *generator* sendiri tingkat investasinya tidak memiliki hubungan dengan *lostdays*, sebaliknya pada perusahaan yang tidak memiliki *generator* tingkat investasinya berhubungan negatif dan signifikan terhadap *lostdays*, sedangkan laba ditahan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap laju investasi swasta.

Penelitian-penelitian di atas semuanya bertujuan untuk mengetahui bagaimana investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor determinannya, namun demikian masing-masing peneliti memberi penekanan yang berbeda pada variabel

yang digunakan. Berbeda dengan peneliti diatas, penelitian ini akan menguji pengaruh pendapatan riil, tingkat suku bunga riil, inflasi dan investasi pemerintah terhadap investasi domestik di Sumatera Barat dengan menggunakan metoda regresi linier berganda.

2.7. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Tingkat Suku Bunga Riil, dan krisis ekonomi secara parsial berpengaruh negatif terhadap investasi domestik di Sumatera Barat.
2. PDRB riil dan investasi Pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap investasi domestik di Sumatera Barat.
3. Secara bersama-sama tingkat suku bunga riil, PDRB riil dan investasi pemerintah serta krisis ekonomi berpengaruh secara bersama-sama terhadap investasi domestik di Sumatera Barat.

BAB III

KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Teori

Isu tentang investasi adalah masalah yang krusial dalam pembahasan pemulihan ekonomi Indonesia termasuk di Propinsi Sumatera Barat. Keterpurukan dalam krisis ekonomi yang berlarut-larut, salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk mengembalikan tingkat investasi seperti sebelum krisis (Sodik, 2008). Investasi adalah pembelian alat-alat modal, persediaan dagang/*inventori*, dan struktur usaha, termasuk pembelian rumah baru untuk rumah tangga. Investasi dihubungkan dengan sektor bisnis yang ditambahkan kepada persediaan modal fisik. Investasi swasta (*private investment*) adalah *output* dari perusahaan yang disimpan untuk perusahaan itu sendiri. Investasi swasta terdiri dari: *Inventory Investment*, termasuk didalamnya semua perubahan dalam persediaan bahan baku (*raw materials*), perlengkapan, dan produk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan. *Fixed Investment*, termasuk didalamnya semua produk yang dibeli oleh perusahaan yang tidak ditujukan untuk dijual kembali. Kedua bentuk investasi ini merupakan elemen yang penting dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi domestik (Saputra, 2008).

Beberapa studi telah dilakukan tentang fungsi investasi di negara-negara berkembang, terutama di *sub-Sahara Afrika*, e.g. Schmidt-Hebbel, et al (1992) dan di Namibia, Ipumbu W. Shiimi and Gerson Kadhikwa (1999). Menurut mereka,

sangat penting untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan investasi swasta. Sayangnya tidak ada usaha yang dilakukan sejauh ini untuk memperkirakan fungsi investasi untuk Sumatera Barat. Beberapa kajian sebelumnya cenderung mengkaji secara historis, namun belum ada yang menggunakan alat ekonometrik untuk memperkirakan faktor-faktor penentu investasi domestik di Sumatera Barat. Secara umum, sejumlah variabel makroekonomi telah dimasukkan dalam model investasi, khususnya untuk investasi domestik, adanya faktor stabilitas makroekonomi pada model investasi yang dilakukan, mencerminkan bahwa faktor-faktor tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap investasi, yang meliputi; pendapatan riil, suku bunga riil, investasi pemerintah dan krisis ekonomi.

a. Pendapatan riil

Literatur menunjukkan hubungan positif yang kuat antara tabungan dan pendapatan. Pendapatan per kapita yang tinggi akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, orang-orang kaya dapat menikmati hasilnya menabung untuk konsumsi masa depan mereka. Di sisi lain orang miskin yang memiliki pendapatan rendah hanya memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi pada tingkat minimum. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi juga berhubungan dengan investasi yang lebih tinggi, karena meningkatkan kepercayaan pengusaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan investasi.

Besar kecilnya PDRB di Propinsi Sumatera Barat menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Tingkat pendapatan masyarakat yang besar yang dicerminkan oleh besarnya nilai PDRB

riil dapat menjadi salah satu alasan kuat bagi investor untuk berinvestasi. Semakin besar tingkat pendapatan masyarakat maka semakin besar pula daya belinya terhadap barang atau jasa yang diproduksi, dengan demikian ekspektasi keuntungan investor juga makin besar. Demikian pula sebaliknya, tingkat pendapatan yang rendah membuat ekspektasi keuntungan juga menjadi rendah, sehingga investor kurang berminat untuk melakukan investasi. Jadi, PDRB riil Propinsi Sumatera Barat akan memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan investasi domestik di daerah ini.

b. Suku Bunga Riil

Pengaruh dari tingkat pengembalian tabungan adalah pertanyaan empiris. Di satu sisi, suku bunga tabungan riil yang lebih tinggi meningkatkan arus pendapatan masa depan dan kekayaan, dengan demikian akan meningkatkan tingkat konsumsi sekarang. Di sisi lain, pengembalian tabungan yang lebih tinggi diharapkan dapat mendorong pelaku ekonomi untuk meningkatkan tabungan, menunda konsumsi saat ini dan berarti konsumsi masa depan yang lebih besar dari pendapatan sekarang. Jika efek substitusi dari kenaikan tingkat pengembalian tabungan mendominasi efek pendapatan, efek akhirnya adalah meningkatkan tabungan.

Suku bunga yang diperhitungkan oleh investor sebagai biaya atas modal yang dipinjamnya, menjadi variabel yang besar kecilnya akan ikut menentukan ekspektasi keuntungan. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menyebabkan biaya atas modal yang ditanggung investor menjadi besar, dengan sendirinya keuntungan bersih yang diperoleh setelah penjualan dikurangi bunga pinjaman

dan biaya-biaya lain (seperti pajak) menjadi kecil. Sebaliknya, dengan tingkat suku bunga yang rendah maka keuntungan bersih yang diperoleh menjadi lebih besar. Jadi, tingkat suku bunga akan memiliki pengaruh yang negatif atau berlawanan terhadap perkembangan investasi domestik di Propinsi Sumatera Barat.

c. Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah, khususnya investasi infrastruktur, dipandang telah memberikan efek gratis pada investasi swasta. Banyak bukti bahwa investasi publik dalam pembangunan infrastruktur memberikan efek positif yang signifikan pada investasi swasta. Sebagai contoh, studi terbaru yang menggunakan sampel dua puluh empat negara-negara berkembang untuk periode 1970-79, menunjukkan bahwa kenaikan pembangunan infrastruktur \$1 akan menaikkan investasi sektor swasta secara nyata sekitar \$ 0,25. Studi yang sama juga menunjukkan bahwa peningkatan dalam bentuk lain dari investasi publik mengurangi investasi swasta sekitar \$ 0,3 (Agonor et al 1996).

Investasi Pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana umum seperti infrastruktur jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya, juga ikut menentukan perkembangan investasi domestik di Propinsi Sumatera Barat. Kondisi dan ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan meminimalkan modal komplementer yang harus disediakan oleh investor. Hal ini akan membuat sebagian besar dari nilai investasi yang direncanakan menjadi semakin produktif. Apalagi jika memang investor tidak berniat untuk menyediakan modal komplementer untuk penyediaan infrastruktur tersebut, maka infrastruktur yang tidak memadai di Propinsi Sumatera Barat akan menyebabkan terganggunya aktivitas produksi dan distribusi barang atau jasa yang dihasilkan. Kedua hal ini,

baik penyediaan modal komplementer dalam investasi maupun gangguan atas aktivitas produksi dan distribusi barang atau jasa, dapat mengakibatkan menurunnya minat investor untuk berinvestasi di Propinsi Sumatera Barat. Demikian pula sebaliknya, jika Propinsi Sumatera Barat memiliki infrastruktur yang memadai maka minat investor untuk berinvestasi akan meningkat. Dengan kata lain, infrastruktur di Propinsi Sumatera Barat memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan investasi domestik di daerah ini.

Berdasarkan faktor-faktor stabilitas makroekonomi diatas, maka spesifikasi Model dalam studi ini merujuk pada spesifikasi model yang dibuat oleh *Ipumbu W. Shiimi and Gerson Kadikwa*. Hipotesis awalnya adalah sebagai berikut :

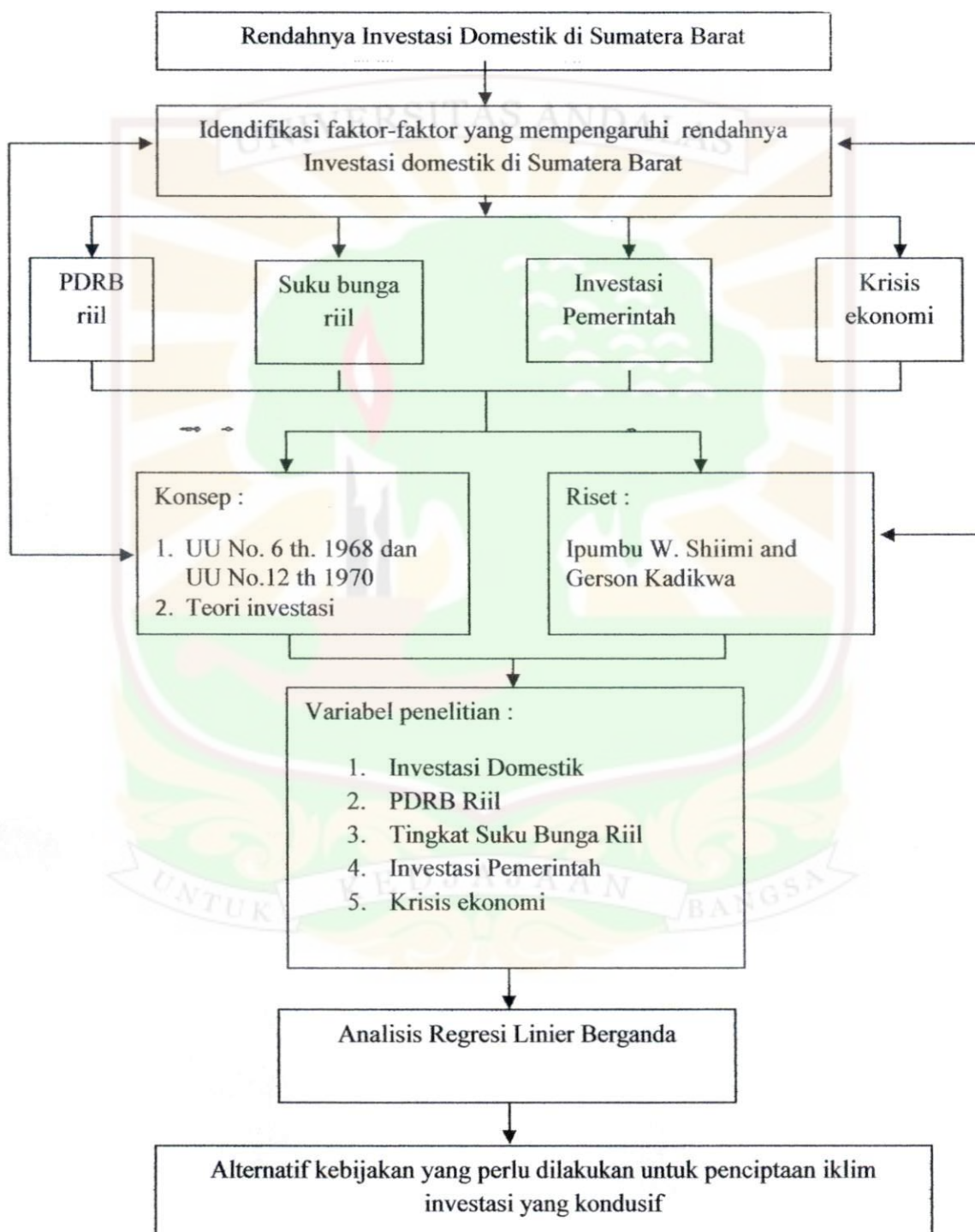
$$InvestasiDomestik = f(PDRB, SukuBungaRiil, InvestasiPemerintah, krisisekonomi)$$

Berdasarkan teori-teori dan fakta empiris sebagaimana dijabarkan diatas, sejauh ini diketahui bahwa perilaku investasi diantaranya dipengaruhi oleh pendapatan riil, suku bunga kredit riil, inflasi dan investasi pemerintah yang sulit disediakan sendiri oleh investor (infrastruktur pengangkutan, sarana dan prasarana umum, dll). Berkaitan dengan penelitian ini, perilaku investasi domestik di Propinsi Sumatera Barat tentunya juga tidak terlepas dari pengaruh variabel-variabel tersebut.

Investasi melalui Penanaman Modal Dalam Negeri atau investasi domestik akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi Sumatera Barat. Dengan meningkatnya iklim investasi yang kondusif akan mampu mendorong

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan juga kesempatan kerja bagi masyarakat di Propinsi Sumatera Barat.

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual



3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Propinsi Sumatera Barat. Dengan makin maju dan berkembangnya investasi domestik, diharapkan membawa dampak terhadap kinerja Propinsi Sumatera Barat, terutama terhadap peningkatan pendapatan regional, di mana sebagian pendapatan regional ini dampak dari bergeliatnya usaha-usaha yang ditunjang oleh meningkatnya nilai investasi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dan peningkatan infrastruktur. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari sampai dengan Mei 2010.

3.2.2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari buku-buku bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari tahun 1990 s/d tahun 2008, yaitu :

- a. Data jumlah investasi domestik khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1990-2008.
- b. Data tingkat suku bunga riil selama periode tahun 1990-2008.
- c. Data PDRB Sumatera Barat tahun 1990-2008
- d. Data inflasi Propinsi Sumatera Barat tahun 1990-2008
- e. Data Investasi Pemerintah di Sumatera Barat tahun 1990-2008.

Data-data yang perlukan dalam penelitian ini di peroleh dari Badan Pusat Statistik, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Barat dan beberapa instansi lainnya.

3.2.3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang telah terjadi. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan Metode Regresi Linier Berganda dengan Variabel Dummy, karena dianggap bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel tingkat suku bunga riil, PDRB dan Investasi Pemerintah serta krisis ekonomi memberikan pengaruh pada investasi domestik. Dalam persamaan regresi ini kita akan mengestimasi parameter-parameter pada suatu persamaan tunggal.

3.2.4. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka dapat dijelaskan definisi operasional untuk tiap-tiap variabel adalah sebagai berikut.

- a. Investasi domestik adalah investasi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam negeri baik investasi baru untuk prasarana dan sarana usaha seperti pabrik, lahan, peralatan dan lain-lain, maupun investasi untuk pengembangan usaha di Propinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 1990 – 2008. Nilai investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai investasi domestik

yang tercatat dalam Sumatera Barat Dalam Angka yang dipublikasikan oleh BPS dengan tahun dasar 2000.

- b. Produk domestik regional bruto riil adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun yang dinilai atas harga dasar konstan tahun 2000 di Propinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 1990 - 2008 dengan.
- a. Tingkat suku bunga riil adalah tingkat suku bunga kredit pada beberapa bank umum dikurangi dengan laju inflasi selama kurun waktu 1990 - 2008.
- d. Investasi pemerintah yang dimaksud disini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan investasi, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh pihak swasta. Pengeluaran rutin tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Nilai investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai investasi pemerintahan umum yang tercatat dan dipublikasikan oleh BPS dengan tahun dasar 2000.
- e. Krisis Ekonomi (Variabel Dummy), dimana pada tahun 1997-1999, tahun 2005 dan tahun 2008 adalah terjadinya kondisi krisis ekonomi dan tahun lainnya adalah tidak terjadi krisis ekonomi.

3.2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Metode Regresi Linear Berganda, dengan fungsi Investasi domestik = $f(\text{PDRB riil, tingkat suku bunga riil, dan investasi pemerintah serta variabel dummy krisis ekonomi})$, merujuk pada Hipotesis awal yang dibentuk Ipumbu tersebut, yaitu :

$$ID = f(R, PDRB, IP D)$$

$$ID = \beta_0 + \beta_1 R + \beta_2 PDRB + \beta_3 IP + \beta_4 D + u$$

Keterangan :

ID = nilai realisasi investasi domestik

$PDRB$ = nilai PDRB riil

R = tingkat suku bunga riil

IP = nilai investasi pemerintah

D = dummy krisis ekonomi

D = 0 ; untuk periode tidak terjadi krisis ekonomi

D = 1 ; untuk periode saat terjadi krisis ekonomi

u = variabel pengganggu

β_0 = konstansta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

Menurut Ipumbu, satu-satunya variabel yang diduga menyebabkan simultanitas bias dalam persamaan diatas adalah pendapatan riil, juga yang sebagian ditentukan oleh investasi swasta, namun karena faktor-faktor dari investasi swasta juga memiliki pengaruh penting pada pendapatan riil, maka diasumsikan tidak ada *endogeneity* dalam thesis ini.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT

4.1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota

Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 daerah kabupaten dan kota, dengan rincian 13 daerah kabupaten dan 6 daerah kota. Luas wilayah masing-masing daerah kabupaten dan kota sebagaimana terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Nama Daerah Kabupaten dan Kota dan Jumlah Kecamatan Se-Sumatera Barat Tahun 2008

No	Daerah Kabupaten dan Kota	Luas (Km2)
1	Kabupaten Agam	2.232,30
2	Kabupaten Pasaman	4.447,63
3	Kabupaten Pasaman Barat	3.387,77
4	Kabupaten Limapuluh Kota	3.354,30
5	Kabupaten Solok	3.738,00
6	Kabupaten Solok Selatan	3.346,20
7	Kabupaten Padang Pariaman	1.328,79
8	Kabupaten Pesisir Selatan	5.794,95
9	Kabupaten Tanah Datar	1.336,00
10	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	3.130,80
11	Kabupaten Darmasraya	2.961,13
12	Kapupaten Kepulauan Mentawai	6.011,35
13	Kota Bukittinggi	25,24
14	Kota Padang	694,96
15	Kota Padang Panjang	23,00
16	Kota Sawahlunto	273,45
17	Kota Solok	57,64
18	Kota Payakumbuh	80,34
19	Kota Pariaman	73,36

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2009

Lokasi daerah yang menghadap ke Samudera Hindia dan agak jauh dari pusat kegiatan ekonomi negara-negara Asia menyebabkan Sumatera Barat kurang menarik bagi investor. Hal ini ditambah lagi kondisi daerah yang terletak di

pegunungan bukit barisan yang curam menyebabkan beberapa daerah akan terisolasi dari pusat perekonomian, dan ongkos barang menjadi lebih mahal sehingga melemahkan daya saing produk yang dihasilkan oleh daerah ini. Walaupun demikian untuk kegiatan tertentu, seperti perkebunan, industri makanan, sayuran, buah-buahan serta kegiatan pariwisata sangat cocok dikembangkan di Propinsi Sumatera Barat, karena daerahnya yang subur serta pemandangannya yang indah.

4.2 Demografi dan Angkatan Kerja.

Menurut hasil Susenas tahun 2007 pada tabel 4.2, jumlah pendudukan Sumatera Barat sebanyak 4,76 juta jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 2,34 juta jiwa, dan penduduk perempuan 2,42 juta jiwa. Kota padang dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 856.815 jiwa dan terkecil adalah kota Padang Panjang sebesar 54.218 jiwa.

Kepadatan penduduk memberikan dampak bagi ketersediaan lahan untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Sekaitan dengan pengembangan usaha kerakyatan, keadaan kepadatan penduduk dapat diprediksi akan memberikan pengaruh pada upaya ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan masyarakat.

Sementara kepadatan penduduk rata-rata Propinsi Sumatera Barat adalah 113 orang per Km², dengan penduduk terpadat di Kota Bukittinggi sebesar 4.202 orang per, Km². pada urutan kedua yaitu Kota Padang Panjang sebesar 2.357 orang per Km², dan pada urutan ketiga yaitu Kota payakumbuh dengan kepadatan penduduk sebesar 1.318 orang per Km². Hal ini terjadi karena banyaknya perpindahan penduduk dari daerah kabupaten ke Kota untuk melanjutkan pendidikan,

mencari pekerjaan, berdagang dan lain-lain sebagainya. Sedangkan daerah yang mempunyai kepadatan penduduk paling kecil adalah Kabupaten Mentawai yaitu sebesar 11 orang per Km², hal ini dapat dimaklumi karena Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten baru di Propinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2008

No	Daerah Kabupaten dan Kota	Jumlah Penduduk (000 orang)	Kepadatan Per Km ²
1	Kabupaten Agam	429,82	193
2	Kabupaten Pasaman	257,37	58
3	Kabupaten Pasaman Barat	333,19	98
4	Kabupaten Limapuluh Kota	331,77	99
5	Kabupaten Solok	355,71	95
6	Kabupaten Solok Selatan	132,09	39
7	Kabupaten Padang Pariaman	387,20	291
8	Kabupaten Pesisir Selatan	442,26	76
9	Kabupaten Tanah Datar	335,93	251
10	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	202,28	65
11	Kabupaten Darmasraya	180,92	61
12	Kapupaten Kepulauan Mentawai	68,10	11
13	Kota Bukittinggi	106,05	4.202
14	Kota Padang	856,82	1.233
15	Kota Padang Panjang	54,22	2.357
16	Kota Sawahlunto	54,31	199
17	Kota Solok	58,47	1.014
18	Kota Payakumbuh	105,99	1.318
19	Kota Pariaman	70,63	963

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2009

Penduduk Sumatera Barat usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja cukup besar yakni sebanyak 2.127.512 orang (63,98 %), terdiri dari yang bekerja sebanyak 1.956.378 orang (58,83%) ; angkatan kerja laki-laki 1.280.972 orang, angkatan kerja perempuan sebanyak 846.540 orang, yang mencari pekerjaan sebanyak 171.134 orang (5,15%). Penduduk bukan angkatan kerja sebanyak

1.197.746 orang (36.02 %) yang terdiri dari penduduk bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya seperti pada tabel 4.3 dan tabel 4.4.

Tabel 4.3. Penduduk Propinsi Sumatera Barat Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2008

No.	Jenis Kegiatan	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
A.	Angkatan Kerja	1.280.972	79,35	846.540	49,48	2.127.512	63,98
	Bekerja	1.187.020	73,53	769.358	44,97	1.956.378	58,83
	Mencari Pekerjaan	93.952	5,82	77.182	4,51	171.134	5,15
B.	Bukan Angkatan Kerja	333.283	20,65	864.463	50,52	1.197.746	36,02
	Sekolah	180.453	11,18	205.142	11,99	385.595	11,60
	Mengurus RT	23.742	1,47	571.761	33,42	595.503	17,91
	Lainnya	129.088	8,00	87.560	5,12	216.648	6,52
Total		1.614.255	100	1.711.003	100	3.325.258	100

Sumber : Susenas dan Sakernas Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat tahun 2009

Tabel 4.4. Jumlah Angkatan Kerja Propinsi Sumatera Barat yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2008

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2007		Tahun 2008	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	905.575	47,93	924.314	47,93
2	Industri Penolahan	139.972	7,41	128.357	6,56
3	Bangunan	78.358	4,15	88.423	4,52
4	Perdagangan	384.094	20,33	396.024	20,24
5	Angkutan	122.053	6,46	125.807	6,43
6	Jasa-Jasa	224.592	11,89	254.590	13,01
7	Lainnya (Pertambangan, Listrik, Keuangan)	34.762	1,84	38.863	1,99
Total		1.808.275	100	1.956.378	100

Sumber : Susenas dan Sakernas Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2009

4.3. Prioritas Pembangunan Sumatera Barat.

Prioritas pembangunan Sumatera Barat, merupakan implementasi dari visi pembangunan 2006-2007, dimana rumusan visi ini sebelumnya disusun dan ditetapkan berdasarkan kajian permasalahan, tantangan, serta potensi yang dimiliki. Rumusan visi pembangunan Sumatera Barat 2006-2007, adalah ***Mewujudkan Sumatera Barat yang tangguh, bersih dalam semangat kebersamaan.***

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Daerah Sumatera Barat, ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan daerah Sumatera Barat 2006-2010, yakni;

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya ;
2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas ;
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih ;
4. Membangun ekonomi yang tangguh dan berkeadilan ;
5. Mengembangkan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan ;
6. Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan ;
7. Memberdayakan Nagari sebagai basis pembangunan ;

Dari ketujuh agenda pokok pembangunan diatas, selanjutnya diterjemahkan lagi kedalam program-program pembangunan yang hendak dicapai lima tahun mendatang.

4.4. Kondisi Perekonomian Sumatera Barat

Pertumbuhan ekonomi regional suatu daerah tidak terlepas dari pertumbuhan masing-masing sektor perekonomian daerah ini secara keseluruhan. Laju

pertumbuhan ekonomi banyak mengalami perubahan dan pada umumnya memperlihatkan variasi yang berbeda-beda. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah serta meningkatnya kemakmuran suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ini juga menjadi masalah utama makroekonomi jangka panjang yang selalu dihadapi oleh suatu negara atau daerah, karena adanya suatu periode ke periode lainnya yang menyebabkan meningkatnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa.

Tabel 4.5. Laju pertumbuhan PDRB Propinsi Sumatera Barat Tahun 1990-2008 berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Tahun	PDRB (Rp.000.000)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1990	14.205.352,45	7,79
1991	15.083.145,25	6,18
1992	16.179.638,26	7,27
1993	17.523.876,30	8,31
1994	18.829.216,90	7,45
1995	20.511.492,33	8,93
1996	22.126.471,56	7,87
1997	23.263.994,76	5,14
1998	21.697.860,80	(6,73)
1999	22.042.474,89	1,59
2000	22.889.614,05	3,84
2001	23.727.373,93	3,66
2002	24.840.187,76	4,69
2003	26.146.781,63	5,26
2004	27.578.136,58	5,47
2005	29.159.480,54	5,73
2006	30.949.945,10	6,14
2007	32.912.968,59	6,34
2008	35.007.921,57	6,37
Rata-rata		5,33

Sumber : PDRB Sumatera Barat dan Sumatera Barat Dalam Angka beberapa edisi

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari tahun 1990 sampai tahun 2008 secara umum telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata sebesar 5,33% per tahun menurut harga konstan tahun 2000. Ini berarti bahwa perkembangan antar sektor ekonomi di Sumatera Barat secara umum telah dapat pula melampaui target yang ditetapkan, lihat tabel 4.5.

Perekonomian menjadi porak poranda akibat hantaman krisis melalui nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan berdampak negatif pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek sosial, khususnya dibidang ketenagakerjaan, kesehatan dan pendidikan. Dampak negatif krisis ekonomi tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1998, hal ini tercermin dari rendahnya kinerja pembangunan yang sanggup dicapai baik secara nasional, maupun regional. Awal krisis tahun 1997 perekonomian Propinsi Sumatera Barat masih tumbuh positif walaupun jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,14%, namun tahun 1998 pertumbuhannya menyusut drastis menjadi minus 6,73% dari sekitar 23.263.994,77 juta rupiah pada tahun 1997 menjadi 21.697.860,81 juta rupiah pada tahun 1998.

Tetapi secara nominal nilai PDRB Propinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang sangat tajam dari Rp. 10.738.325.910.000 pada tahun 1997 menjadi Rp. 17.642.740.010.000 pada tahun 1998 atau mengalami peningkatan sebesar 64,30%. Namun demikian peningkatan yang pesat ini tidaklah menggembirakan karena diikuti pula oleh laju inflasi yang sangat tinggi pada tahun ini yaitu 10,72% pada tahun 1997 menjadi 87,20% pada tahun 1998.

Setelah mengalami keterpurukan yang parah pada tahun 1998, kondisi perekonomian Propinsi Sumatera barat pada tahun 1999 mulai mengalami sedikit

kemajuan. Hal ini disebabkan oleh telah dilakukannya berbagai kebijakan, penyelamatan (*rescue*) dan program pemulihan (*recovery*) disegala bidang. Melalui program pemerintah seperti Program Pengaman Sosial (JPS), PMDK dan lainnya telah memberikan hasil yang signifikan terhadap proses pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Propinsi Sumatera Barat secara riil yaitu 21.697.860,81 juta rupiah pada tahun 1998 menjadi 22.042.474,89 juta rupiah pada tahun 1999. Kinerja perekonomian pada tahun 2000 secara perlahan menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan yaitu 3,84% dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2001 yaitu 3,66%. Kondisi ini terus meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 mencapai 6,37%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 diatas.

Sedangkan PDRB untuk semua sektor dapat dilihat pada lampiran. Apabila dicermati pertumbuhan rata-rata masing-masing sektor pada pembentukan PDRB Propinsi Sumatera Barat dari tahun 1990 s/d 2008, terdapat empat sektor yang pertumbuhannya diatas 5% yakni sektor listrik dan air minum sebesar 12,14%, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 6,90%, sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 6,53%, sektor industri pengolahan sebesar 6,40% dan sektor bangunan sebesar 5,26%.

4.5. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara nilai PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Berdasarkan tabel 4.6, PDRB perkapita Sumatera Barat selama tahun 1990-2008 secara umum terus mengalami peningkatan. Namun pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu mencerminkan

kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, karena juga ditentukan oleh perkembangan jumlah penduduk.

Tabel 4.6. PDRB Perkapita Propinsi Sumatera Barat Tahun 1990-2008 tahun dasar 2000

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	PDRB Perkapita (Rp.)
1990	3,978,524	3.570.508
1991	4,042,668	3.730.988
1992	4,075,299	3.970.172
1993	4,171,200	4.201.159
1994	4,234,000	4.447.146
1995	4,300,000	4.770.114
1996	4,367,550	5.066.106
1997	4,433,600	5.247.202
1998	4,498,750	4.823.087
1999	4,563,000	4.830.698
2000	4,248,520	5.387.668
2001	4,273,270	5.550.976
2002	4,375,060	5.655.618
2003	4,418,900	5.850.341
2004	4,528,242	6.080.559
2005	4,555,810	6.386.043
2006	4,632,152	6.681.547
2007	4,697,764	7.006.098
2008	4,763,099	7.349.818

Sumber : PDRB Sumatera Barat dan Sumatera Barat Dalam Angka beberapa edisi

PDRB perkapita Sumatera Barat pada tahun 1990 (Rp. 3.570.508) sampai dengan tahun 1997 (Rp. 5.247.202) terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 1998 dan 1999 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp. 4.823.087 pada tahun 1998 dan Rp. 4.830.698 pada tahun 1999, sebagai akibat dari terjadinya

krisis ekonomi. Pada tahun 2000-2008 PDRB perkapita penduduk Propinsi Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan yang cukup baik.

4.6. Perkembangan Investasi Domestik

Investasi adalah salah satu faktor penting penggerak pembangunan provinsi Sumatera Barat karena Investasi merupakan sumber pembiayaan lainnya yang sangat penting untuk pengembangan kegiatan ekonomi daerah. Disamping itu, investasi juga merupakan salah satu unsur penting yang dapat memberikan gambaran tentang potensi ekonomi suatu daerah. Tingkat investasi yang tinggi menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah setempat diperkirakan cukup besar demikian pula sebaliknya. Investasi dibedakan atas investasi asing dan investasi domestik. Perkembangan investasi domestik lebih terkait dengan usaha kecil dan menengah sehingga mempunyai hubungan yang lebih erat dengan potensi pengembangan BPR. Perkembangan Investasi domestik tahun 1990-2008 di Propinsi Sumatera Barat sangat berfluktuatif seperti terlihat pada tabel 4.7.

Persetujuan investasi domestik tahun 1996 sebelum terjadinya krisis ekonomi mencapai Rp. 3,135 triliun. Akan tetapi realisasi yang dilakukan oleh pengusaha dalam kenyataannya sangat rendah yaitu hanya Rp. 0,204 triliun saja. Keadaan ini memperlihatkan bahwa para pengusaha umumnya masih ragu-ragu untuk melakukan investasi di daerah walaupun persetujuan telah didapatkan. Begitu krisis ekonomi terjadi mulai pertengahan tahun 1997, jumlah persetujuan investasi domestik menurun drastis menjadi hanya Rp. 769,613 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 421,170 milyar. Malahan tahun 1998 ketika krisis ekonomi mencapai puncaknya,

jumlah persetujuan investasi domestik terus menurun karena banyaknya usaha yang terpaksa mengurangi kegiatannya guna mengurangi resiko kerugian. Walaupun demikian realisasi investasi domestik tahun 1998 ternyata melebihi persetujuan, karena termasuk juga investasi domestik yang telah disetujui pada tahun sebelumnya yaitu Rp. 685,383 milyar, Penurunan persetujuan dan realisasi investasi domestik terus berlanjut sampai tahun 2002 dan baru bangkit kembali pada tahun 2003, yang ditandai dengan peningkatan nilai persetujuan PMDN menjadi Rp. 238,046 milyar dan hanya terealisasi Rp. 204,464 milyar, gambaran lebih lengkap pada tabel 4.7.

Tabel 4.7. Persetujuan dan Realisasi Investasi Domestik di Propinsi Sumatera Barat Tahun 1990- 2008

Tahun	Investasi Domestik (Rp.000.000)	
	Disetujui	Realisasi
1990	441,790.00	102,956.00
1991	654,376.00	186,391.00
1992	119,588.00	229,857.00
1993	47,698.00	267,958.00
1994	576,880.00	174,545.00
1995	717,970.00	256,047.00
1996	3,135,075.00	204,091.00
1997	769,613.00	421,170.00
1998	419,190.00	685,383.00
1999	309,199.00	348,030.00
2000	492,322.80	187,773.00
2001	152,059.26	183,976.00
2002	65,435.62	348,234.00
2003	238,046.84	204,465.00
2004	712,333.44	631,733.00
2005	358,420.30	607,061.00
2006	1,113,992.50	495.779,00
2007	2,667,814.88	585.100,00
2008	731,089.78	608.920,00

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Barat beberapa edisi

Gambaran secara umum investasi PMDN menunjukkan fluktuasi, dimana penyebab tingginya investasi pada tahun 2004 yang mencapai Rp631.733,33 juta, sekitar dua hingga tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian Sumatera Barat mengingat realisasi investasi pada semester I tahun 2005 telah mencapai Rp380.000,00 juta (BKPM, 2005).

Disamping pengaruh krisis ekonomi, rendahnya kegiatan investasi domestik juga sangat terkait dengan potensi ekonomi daerah yang tidak terlalu besar. Sebagaimana diketahui walaupun Propinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang subur, tetapi memiliki sumber daya alam yang terbatas seperti halnya daerah tetangga Riau. Kegiatan ekonomi yang cukup besar hanya pada industri semen. Walaupun demikian Propinsi Sumatera Barat mempunyai potensi untuk dikembangkan pada jenis kegiatan tertentu seperti perkebunan, industri kerajinan, konveksi, industri makanan, syuran dan buah-buahan serta kegiatan pariwisata, karena memiliki lahan yang subur serta pemandangan yang indah.

4.7. Perkembangan tingkat suku bunga dan laju inflasi

Tingkat suku bunga mempunyai hubungan negatif dengan investasi, dimana semakin rendah tingkat suku bunga maka investasi akan meningkat, dan sebaliknya semakin tinggi tingkat suku bunga maka investasi akan menurun karena orang lebih cenderung untuk menabung di lembaga keuangan. Tingkat suku bunga disini adalah tingkat suku bunga riil, yang merupakan tingkat suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi.

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa pada tahun 1990 tingkat suku bunga kredit investasi nominal pada bank pemerintah sebesar 18,95 % pertahun, sedangkan laju inflasi sebesar 6,74 %, maka tingkat bunga riil menjadi 12,21 %. Selanjutnya pada tahun 1991 suku bunga nominal mengalami peningkatan yaitu 20,87 %, tapi peningkatan ini juga dibarengi dengan naiknya tingkat inflasi sehingga tingkat suku bunga riil menurun. Sedangkan pada tahun 1992 laju inflasi yang kecil (2,92%) menyebabkan tingkat bunga riil yang besar yaitu 16,21 %.

Tabel 4.8. Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit dan Laju Inflasi Tahun 1990–2008

Tahun	Tingkat Suku Bunga Nominal (%)	Inflasi (%)	Tingkat Bunga Suku Riil (%)
1990	18.95	6.74	12.21
1991	- 20.87	11.32	9.55 -
1992	19.21	2.92	16.29
1993	17.06	9.28	7.78
1994	14.96	8.73	6.23
1995	15.75	8.36	7.39
1996	16.42	6.25	10.17
1997	17.34	10.72	6.62
1998	26.2	87.2	-61
1999	17.8	4.23	13.57
2000	16.86	10.99	5.87
2001	17.9	9.86	8.04
2002	17.82	10.22	7.6
2003	15.68	5.55	10.13
2004	14.05	6.98	7.07
2005	15.66	20.47	-4.81
2006	15.1	8.05	7.05
2007	13.01	6.9	6.11
2008	14.4	12.68	1.72

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Sumatera Barat Bank Indonesia beberapa tahun terbit

Pada tahun 1994 -1997 tingkat suku bunga dan laju inflasi cukup stabil, tetapi pada tahun 1998, krisis moneter yang melanda indonesia mengakibatkan tingkat

suku bunga nominal meningkat menjadi 26,20 %, tapi peningkatan ini juga dibarengi oleh peningkatan inflasi yang sangat besar yaitu 87,2 %, sehingga tingkat suku bunga riil mencapai nilai terendah yaitu (-61,00) %.

Selanjutnya tingkat inflasi yang rendah sangat diupayakan oleh berbagai negara didunia agar nilai mata uang tetap stabil. Namun sesuai dengan kurva Philips semakin rendah tingkat inflasi maka pengangguran akan meningkat (Samuelson, 1997; 328). Karena inflasi berhubungan terbalik dengan pengangguran. Biasanya untuk menekan inflasi pemerintah akan menaikkan suku bunga. Sehingga akan menaikkan ongkos produksi, karena kebanyakan pengusaha memanfaatkan kredit untuk usahanya. Maka dengan naik suku bunga tentu investasi berkurang dan secara langsung akan mengurangi kesempatan kerja, yang pada gilirannya akan menurunkan pertumbuhan *ekonomi*. Sedangkan untuk mengurangi pengangguran pemerintah biasanya melakukan pengeluaran investasi, agar permintaan tenaga kerja meningkat atau dengan menurunkan suku bunga maka investasi akan bertambah. Bertambahnya investasi tentu akan membuka lapangan kerja baru. Dengan berkurangnya pengangguran dan bertambahnya tenaga kerja akan meningkatkan daya beli sehingga menyebabkan inflasi meningkat. Apabila dilihat dari sisi pemerintah, hal ini menjadi suatu dilema sebab pemerintah biasanya diharapkan dapat menekan laju inflasi dan menurunkan tingkat pengangguran. Namun sebenarnya ada angka tertentu untuk tingkat pengangguran yang wajar.

4.8. Perkembangan Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal yang bertujuan untuk merangsang perekonomian secara umum terutama di bidang investasi. Investasi pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana umum lainnya. Dengan dibangunnya infrastruktur yang memadai diharapkan dapat merangsang masuknya investor ke daerah.

Tabel 4.9. Perkembangan Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Bidang Pembangunan Tahun 1990-2008

Tahun	Jumlah (Rp.000.000)	Pertumbuhan (%)
1990	27,589.00	5.24
1991	31,994.00	15.97
1992	- 34,200.00	6.90
1993	38,648.00	13.01
1994	45,236.00	17.05
1995	54,533.00	20.55
1996	71,475.00	31.07
1997	73,497.00	2.83
1998	63,377.00	(13.77)
1999	91,932.00	45.06
2000	117,064.00	27.34
2001	131,064.00	11.96
2002	130,477.00	(0.45)
2003	227,564.00	74.41
2004	656,343.00	188.42
2005	745,549.00	13.59
2006	760,459.00	2,00
2007	775,669.00	2,00
2008	782,103.00	0,83
Rata-rata		24,42

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Sumatera Barat BPS beberapa edisi

Peningkatan investasi pemerintah akan mempengaruhi investasi yang dilakukan swasta secara positif karena penciptaan infrastruktur oleh pemerintah cenderung mengurangi biaya produksi, meningkatkan *return to scale* dan memberikan keuntungan pada perusahaan. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah akan meningkatkan pengembangan industri-industri baru dan permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh industri yang bersangkutan.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa investasi pemerintah di Propinsi Sumatera Barat tahun 1990-2008 mengalami perkembangan yang sangat berfluktuasi. Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu 188,42% dan terendah pada tahun 2006 yaitu (-43,83%). Dari tahun 1990 s/d tahun 1997 terjadi perkembangan yang cukup baik yaitu meningkat berkisar antara 2 s/d 31 %. Pada tahun 1998 investasi pemerintah mengalami penurunan sebesar (-13,77%) sebagai akibat dari krisis ekonomi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesa

Berdasarkan data yang telah diperoleh maka pada bab ini dilakukan pengolahan data terhadap semua data ekonomi makro yang telah dikumpulkan beserta analisisnya sehingga dari pengolahan data tersebut dapat diketahui apakah variabel-variabel bebas yaitu suku bunga, PDRB, investasi pemerintah, dan kaitannya dengan variabel terikat berupa investasi domestik di Sumatera Barat, sedangkan data selengkapnya yang diperoleh dari studi ini terdapat pada lampiran.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik. Dimana analisis deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada variabel-variabel penelitian untuk mendukung hasil analisis statistik. Sedangkan analisis statistik merupakan analisis yang mengacu pada perhitungan data penelitian yang merupakan angka-angka yang dianalisis dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS. 12.0 *for Windows*.

5.2. Hasil Penemuan Empiris

Hasil penelitian empirik terhadap data-data yang disebutkan pada Bab IV dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Estimasi Variabel Terhadap Investasi Domestik

Variabel	(1)	(2)
<i>Konstanta</i>	121,861 (1,728)	13,695 (0,607)
<i>R</i>	-2,602 (-3,793)****	-0,11 (-2,046)**
<i>PDRB</i>	0,000 (0,077)	0,203 (0,233)
<i>IP</i>	0,258 (3,188)****	0,253 (1,403)
<i>D</i>	54,987 (2,123)**	0,350 (1,808)**
<i>F</i>	23,312	11,233
<i>R²</i>	0,869	0,762
<i>DW-test</i>	2,750	2,352
Jumlah Observasi	19	19

****signifikan pada $\alpha=1\%$, *** signifikan pada $\alpha=5\%$, **signifikan pada $\alpha=10\%$

Kolom (1) = regresi linier

Kolom (2) = regresi semiliniar

Sumber : Data hasil olahan 2010

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5.1, dapat disimpulkan bahwa fungsi model empiris linier memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan model semiliniar. Dengan derajat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) bentuk fungsi regresi semiliniar (2) tidak bisa digunakan untuk analisis karena nilai t-hitung variabel-variabelnya tidak signifikan secara statistik sedangkan dengan bentuk fungsi regresi linier (1) signifikan secara statistik.

Secara umum hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 seperti pada tabel 5.2. Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (*VIF*) menunjukkan tidak ada satu pun variabel bebas yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 5.2. Hasil Uji Multikolinearitas

variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
R	.760	1.316
PDRB	.206	4.854
IP	.217	4.618
D	.697	1.436

Sumber : Data hasil olahan 2010

Sedangkan koefisien korelasi secara parsial dapat dilihat pada tabel 5.3. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa antara variabel PDRB dan variabel investasi pemerintah diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.879, hal ini berarti bahwa secara parsial terdapat hubungan yang kuat (87,9%) antara variabel PDRB dan variabel investasi pemerintah. Hubungan yang kuat antara kedua variabel ini dicurigai sebagai adanya multikoleniaritas yang disebabkan oleh nilai investasi pemerintah telah termasuk kedalam nilai PDRB riil. Oleh sebab itu salah satu cara untuk mengatasi multikoleniaritas adalah dengan mengeluarkan salah satu variabel yang berkorelasi (Damodar Gujarati, 2000). Dalam hal ini antara variabel PDRB dan investasi pemerintah, yang akan dikeluarkan adalah investasi pemerintah karena variabel PDRB memiliki nilai yang lebih umum digunakan dalam perhitungan ekonomi suatu daerah.

Tabel 5.3. Koefisien Korelasi Parsial

variabel	D	IP	R	PDRB
D	1.000	.098	.467	-.222
IP	.098	1.000	-.077	-.879
R	.467	-.077	1.000	.040
PDRB	-.222	-.879	.040	1.000

a Dependent Variable: id

Sumber : Data hasil olahan 2010

Adapun hasil regresi yang didapat setelah variabel investasi pemerintah dikeluarkan adalah seperti tabel 5.4.

Tabel 5.4. Estimasi Variabel Terhadap Investasi Domestik Sebagai Solusi Masalah Multikoleniarity

Variabel	(1)
<i>Konstanta</i>	-61,569 (-1,188)
<i>R</i>	-2,433 (-2,803)***
<i>PDRB</i>	0,11 (4,767)****
<i>D</i>	46,914 (1,434)
<i>F</i>	17,190
<i>R²</i>	0,775
<i>DW-test</i>	2,074
Jumlah Observasi	19

****signifikan pada $\alpha=1\%$, *** signifikan pada $\alpha=5\%$, **signifikan pada $\alpha=10\%$

Kolom (1) = regresi linier

Sumber : Data hasil olahan 2010

Hasil koefisien regresinya dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$ID = -61,569 - 2,433 R + 0,011 PDRB + 46,914 D$$

Hasil pengujian regresi secara keseluruhan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel ekonomi makro, khususnya suku bunga, PDRB dan krisis ekonomi yang mempengaruhi besarnya investasi domestik di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai *F-hitung* (17,190) yang lebih besar dari *F-tabelnya* (3,11). Namun apabila ditinjau dari segi parsial, variabel yang signifikan pada selang kepercayaan 95% adalah variabel suku bunga dan PDRB sedangkan variabel krisis ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan pada selang kepercayaan 95% terhadap investasi domestik di Sumatera Barat. Hasil ini tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shiimi W. Ipumbu yang menemukan bahwa tingkat bunga dan investasi pemerintah

memberikan pengaruh yang kuat terhadap investasi domestik sedangkan PDRB tidak memberikan pengaruh yang signifikan (Ipumbu, 1999). Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik daerah, pola perekonomian daerah, infrastruktur daerah, dan investasi di Namibia lebih didominasi oleh pemilik modal asing sementara di Sumatera Barat PMA belum mendominasi.

a. Suku Bunga

Variabel suku bunga memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap nilai realisasi investasi domestik di Sumatera Barat, dengan nilai *t-hitung* sebesar -2,803 yang lebih kecil dari *t-tabel* sebesar $\pm 2,145$. Nilai koefisien suku bunga (β_1) = -2,433 berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan satu persen tingkat suku bunga (*R*) akan menurunkan besarnya investasi domestik sebesar 2,433 milyar rupiah, dan signifikan terhadap $\alpha = 5\%$. Sehingga hipotesis pertama untuk variabel suku bunga yang diberikan terbukti dan dapat diterima. Koefisien ini tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 90% berarti bahwa tingkat suku bunga riil rata-rata pada bank-bank umum sebesar 4,08 % yang ada di Sumatera Barat masih belum stabil, sehingga kontribusinya terhadap investasi domestik sangat kecil. Hal ini harus diperbaiki karena investasi dan tingkat suku bunga merupakan suatu variabel yang saling terkait.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shiimi W. Ipumbu yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga adalah signifikan

sebagai faktor-faktor penentu investasi domestik pada tingkat signifikansi 5% (Ipumbu, 1999). Dalam teori ekonomi makro disebutkan bahwa investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Apabila tingkat suku bunga naik maka investasi akan berkurang dan begitu sebaliknya, tingkat suku bunga mempunyai hubungan negatif dengan investasi (Mankiw, 2000, 430). Untuk melakukan investasi seseorang biasanya membutuhkan dana yang dipinjam dari lembaga keuangan dan suku bunga merupakan *cost of funds*. Atau, bila seseorang memiliki dana pribadi, maka suku bunga (dikalikan pokok) menjadi *opportunity cost* yang harus dikorbankan bila dana ini digunakan untuk belanja investasi. Karena, semakin tinggi tingkat bunga maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh bila dana ini ditempatkan dalam bentuk tabungan.

Secara teoritis, meningkatnya suku bunga kredit dapat dipandang sebagai naiknya harga uang yang menyebabkan semakin berkurangnya minat investor mengambil kredit untuk menghindari tekanan biaya bunga karena tingkat bunga merupakan komponen biaya modal yang utama. Logikanya bunga yang rendah orang akan mau meminjam ke bank, uang yang dipinjam tersebut akan digunakan untuk investasi yang akhirnya akan meningkatkan produksi, pendapatan dan keuntungan (Mankiw, 2000).

Temuan ini juga mendukung teori Keynes dimana investasi sepenuhnya bergantung pada suku bunga (Sukirno, 2000). Sementara tingkat suku bunga merupakan faktor penting yang mempengaruhi investasi swasta. Tingkat bunga yang tinggi dapat ditafsirkan sebagai hambatan bagi investasi untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi. Namun, di tengah tekanan

inflasi yang kuat, tingkat bunga yang tinggi diperlukan untuk mengimbangi permintaan kredit yang berlebih, dengan adanya inflasi akan menurunkannya ke tingkat yang konsisten agar pertumbuhan dan pembangunan dapat berkelanjutan. Oleh karena itu, masalah penentuan suku bunga menjadi masalah penting bagi negara yang sedang berkembang yang sedang mengalami proses liberalisasi dalam proses ekonominya.

Kesulitan memperoleh fasilitas kredit untuk investasi dan pengembangan modal kerja menjadi salah satu kendala bagi investor. Di sektor pembiayaan, sekalipun banyak perbankan BUMN dan swasta yang beroperasi di Sumatera Barat, tetapi masih sering ditemui keluhan dari para pelaku usaha bahwa tingkat bunga kredit yang dibebankan tergolong tinggi, mencapai tigapuluh (30) persen, serta kesulitan memperoleh kredit (DPR-RI, 2005). Hal ini membuat pengusaha tidak kompetitif dalam bersaing. Untuk itu diperlukan upaya Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam mensosialisasikan izin iktan lain, melakukan *business meeting* dan memfasilitasi kemitraan usaha PMA/PMDN dengan UMKM, serta membangun kerjasama dengan bank untuk pembiayaan investasi, selain melakukan berbagai sosialisasi yang terkait dengan upaya menggairahkan investasi di Propinsi Sumbar.

Untuk Sumatera Barat khususnya dan propinsi-propinsi lain umumnya, besaran tingkat suku bunga mengacu pada besaran tingkat bunga nasional. Berdasarkan data pada tabel 4.9 besarnya suku bunga sangat berfluktuasi, bahkan pada tahun 1998 tingkat suku bunga mencapai 26,20% tapi peningkatan ini juga dibarengi oleh peningkatan inflasi sebesar 87,2% sehingga tingkat suku bunga riil mencapai nilai terendah yakni (-61,00)%.

Begitu juga pada tahun 2005, tingkat suku bunga riil mencapai nilai $(-4,81)\%$ (Bank Indonesia, 2005). Penurunan tingkat suku bunga kredit harus dilakukan secara hati-hati karena disamping *cost of money* akibat tingginya tingkat bunga deposito yang dapat mengakibatkan pelarian modal keluar negeri, juga adanya kecendrungan *capital flight* serta faktor-faktor yang bersifat inflator.

Penentuan suku bunga ini sangat tergantung pada seberapa besar pasar uang domestik telah diliberalisasikan karena proses penentuan suku bunga ini berbeda untuk derajat keterbukaan sektor finansial yang berbeda, dimana derajat keterbukaan perekonomian dapat dilihat pada *capital account* neraca pembayaran negara tersebut.

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian Sumatera Barat perlu memperhatikan banyak faktor untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit menjadi lebih kecil dari tahun sebelumnya antara lain tingkat/derajat keterbukaan perekonomian daerah, artinya seberapa besar perekonomian daerah tergantung kepada daerah/negara lainnya. Hal ini perlu diperhatikan karena tinggi rendahnya penerimaan ekspor dan pengeluaran impor akan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya suku bunga domestik; laju inflasi domestik maupun luar negeri, juga pengaruh devaluasi, pendapatan riil serta kecepatan penyesuaian baik terhadap perubahan suku bunga luar negeri maupun terhadap perubahan eksternal lainnya.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil yang diperoleh, variabel yang dominan mempengaruhi nilai realisasi investasi domestik adalah PDRB dengan nilai t-

hitung sebesar 4,767 yang lebih besar dari *t-tabel* sebesar 2,131. Koefisien produk domestik regional bruto (PDRB) (β_2) adalah 0,011, berarti bahwa akan terjadi peningkatan investasi domestik sebesar 1,1% apabila terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 milyar, dan signifikan terhadap $\alpha = 1\%$, berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara individu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan investasi domestik di Sumatera Barat. Sesuai dengan teori akselerasi, teori investasi Neo Klasik yang menyatakan bahwa pendapatan nasional yang semakin meningkat akan meningkatkan daya beli masyarakat dan secara langsung juga meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Peningkatan permintaan ini memerlukan investasi dalam jumlah yang besar pula. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional mempunyai hubungan positif dengan investasi. Dernburg (1981); Allen (1967) juga mengatakan bahwa investasi dipengaruhi oleh tingkat output yang ingin dihasilkan pada waktu tertentu (Firmansyah, 2008). Hal ini juga sesuai dengan prinsip akselerasi yang dikemukakan oleh J.M Clark yang menyatakan bahwa tingkat/besarnya investasi secara proporsional bergantung kepada *output* (PDRB).

Temuan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shiimi W. Ipumbu yang menemukan bahwa PDRB tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap investasi domestik (Ipumbu, 1999). Menurut Salvatore (1983), variabel output/pendapatan signifikan positif mempengaruhi investasi. Hal ini disebabkan karena PDRB yang besar memperlihatkan permintaan pasar yang besar, oleh karena itu Sumatera Barat perlu meningkatkan investasi dibidang industri yang berorientasi ekspor.

Sprout (1993) meneliti bahwa negara-negara yang berorientasi ekspor produk industri lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Contohnya Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Namibia. Untuk itu perlu dikembangkan sektor-sektor yang menghasilkan pemasukan terhadap pemerintah. Sektor industri bisa dikembangkan karena multiplier efek terhadap sektor lainnya seperti meningkatkan permintaan terhadap listrik, gas dan air minum, serta yang perlu diperhatikan dalam pengembangan industri ini adalah dalam penggunaan bahan baku lokal harus lebih banyak daripada bahan impor sehingga sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan akan berkembang juga.

Kebijakan utama dalam pembangunan perekonomian Propinsi Sumatera Barat adalah memacu laju pertumbuhan ekonomi berbasis investasi. Sumber ekonomi yang potensial harus dipacu perkembangannya supaya sektor produktif dan pelayanan dapat mengembangkan kapasitasnya (Syafrizal, 2008). Karena PDRB merupakan ukuran dari pertumbuhan ekonomi daerah dan berpengaruh signifikan terhadap investasi domestik di Sumatera Barat, maka untuk itu perlu dipacu laju pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat masih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi tetangganya seperti Jambi, Riau, Kepulauan Riau dan Bengkulu (BKPMMD, 2009), hal ini disebabkan oleh kurang atraktifnya pembangunan di daerah Sumatera Barat sehingga sulit untuk memacu pertumbuhan ekonominya, keterbatasan skala produksi yang disebabkan oleh kurangnya investasi, membuat pengembangan sektor industri pendukung, termasuk agro-industri seperti industri pengalengan ikan dan

pengemasan barang (*packaging*) kurang dapat berkembang. Selain itu, daerah masih belum melakukan kajian potensi secara terintegrasi, khususnya antar instansi di daerah.

Menurut Nurkse (dalam Jhingan, 1995), pembangunan ekonomi berkaitan berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan latar belakang historis. ... Didalam pertumbuhan ekonomi faktor sosial, budaya, politik, dan psikologis adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi.

c. Krisis Ekonomi

Krisis Ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada selang kepercayaan 95% ataupun pada selang kepercayaan 90% terhadap nilai realisasi investasi domestik di Sumatera Barat tetapi ada kecenderungan untuk mempengaruhi saja bila dilihat dari korelasi variabel tersebut terhadap nilai realisasi investasi domestik di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai *t-hitung* sebesar 1,434 yang lebih kecil dari *t-tabel* sebesar 2,131. Nilai koefisien krisis ekonomi (β_4) = 46,914 berarti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kali terjadi krisis ekonomi baik yang disebabkan oleh krisis moneter maupun krisis BBM tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai investasi domestik di Sumatera Barat, dan tidak signifikan pada $\alpha = 10\%$, walaupun ada pengaruhnya sangat kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa dilakukan atau tidak dilakukannya investasi domestik tidak ditentukan oleh adanya krisis ekonomi. Barro (1995) juga menemukan tidak berartinya krisis ekonomi terhadap investasi. Keadaan

ekonomi yang stabil merupakan syarat pokok untuk tercapainya stabilitas ekonomi makro (Kadin, 2007).

Namun pada kenyataannya, selain faktor-faktor makro ekonomi diatas, investasi di Sumatera Barat masih terbelit sejumlah kendala, diantaranya (BKPM Sumbar, 2010):

1. Infrastruktur pendukung yang tidak lengkap.

Infrastruktur yang ada belum memadai apalagi setelah Sumatera Barat dilanda gempa dalam beberapa tahun terkhir ini yang menyebabkan banyaknya infrastruktur mengalami kerusakan, akibatnya pemodal memilih menunggu pemulihan selesai. Saat ini, investor bersikap *wait and see* sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

2. Ketidakakuratan program pengembangan usaha, serta tidak adanya data lengkap tentang potensi investasi di Sumatera Barat secara terintegrasi. Bahkan investor terpaksa keluar masuk ke sejumlah birokrasi guna mencari data terkait jenis investasi yang akan dipilihnya. Akibatnya banyak investor merasa kecewa yang pada akhirnya membatalkan investasinya di Sumatera Barat, padahal mereka tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Barat yang dinilai menjanjikan.

3. Kurangnya akses terhadap lahan usaha dan kepastian usaha, serta menyangkut masalah status tanah ulayat.

4. Kurangnya interaksi pemerintah daerah dengan pengusaha.

5. Biaya transaksi daerah tinggi menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi investor, sehingga tidak menarik bagi pengusaha untuk melakukan investasi.

6. Proses perizinan usaha yang memakan waktu lama dan berbelit-belit. Perizinan dikeluarkan oleh birokrasi pemerintah pada dasarnya bertujuan

untuk pengaturan, namun dalam prakteknya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

7. Adanya peraturan daerah yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kendala-kendala tersebut termasuk dalam kategori kendala kelembagaan sesuai dengan hasil penelitian Bank Indonesia pada tahun 2005, untuk dapat menganalisis kendala-kendala tersebut secara ekonometrik diperlukan data yang akurat dan runut waktu, namun sejauh ini di Sumatera Barat data tersebut belum tersedia. Selain itu penelitian harus dilakukan secara langsung kepada para pengusaha/investor yang telah atau akan berinvestasi di Sumatera Barat sehingga diperlukan rentang waktu penelitian yang lebih lama. Oleh karena itu pembahasan permasalahan iklim investasi ini dalam thesis ini lebih di fokuskan pada faktor-faktor makro ekonomi seperti yang telah diuraikan diatas.

5.3. Analisis Hasil Uji Statistik

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda beserta pengujian hipotesisnya baik secara parsial (uji T) maupun secara simultan (uji F), serta juga dengan melihat nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi (R^2).

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t yang digunakan adalah uji t satu arah. Hasil dari perhitungan uji t pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa :

1. Variabel Suku bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap investasi domestik. Dengan nilai t -hitung sebesar -3,793 yang lebih besar dari t -tabel sebesar $\pm 2,145$, dan signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti meningkatnya suku

bunga akan menurunkan investasi domesik dan sebaliknya menurunnya suku bunga akan meningkatkan investasi domestik di Sumatera Barat.

2. *Product Domestik Regional Bruto* (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi domestik. Dengan nilai *t*-hitung sebesar 0,77 yang lebih kecil dari *t*-tabel sebesar $\pm 2,145$, dan tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ dan 10% . Hal ini berarti peningkatan ataupun penurunan PDRB tidak akan meningkatkan atau menurunkan nilai investasi domestik secara nyata.
3. Investasi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap investasi domestik. Dengan nilai *t*-hitung sebesar 3,188 yang lebih besar dari *t*-tabel sebesar $\pm 2,145$, dan signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hal ini berarti peningkatan investasi pemerintah khususnya dalam hal sarana prasarana/infrastruktur umum akan mendorong meningkatnya investasi domestik di Sumatera Barat.
4. Krisis ekonomi, baik yang disebabkan oleh krisis moneter maupun krisis BBM tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$) tetapi signifikan pada $\alpha = 10\%$ terhadap investasi domestik.

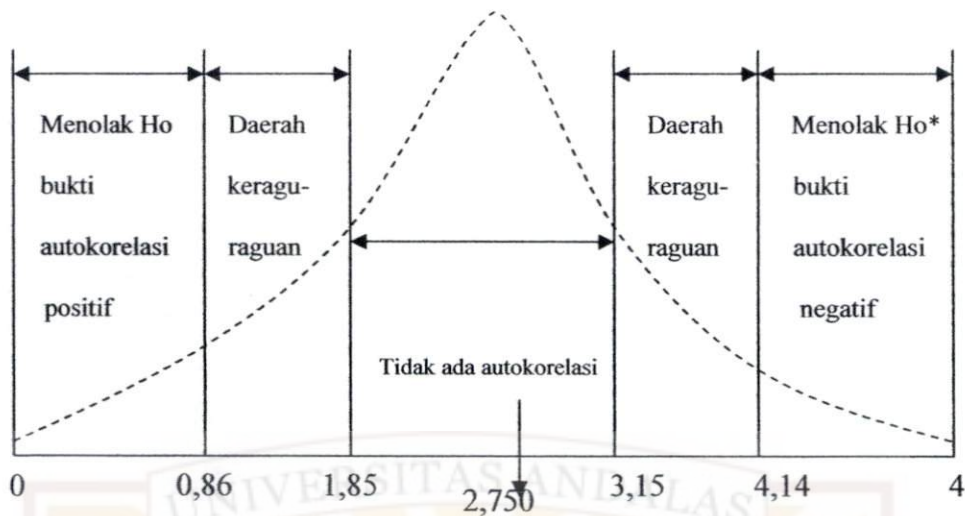
Uji statistik *F* pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/independen. Dari hasil perhitungan pada tabel 5.1 diperoleh nilai *F*-hitung sebesar 23,312 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikan 95% ($\alpha = 5\%$) dan derajat kebebasan (*df*; $k-1 = 4$, $n-k = 19-5 = 14$), maka diperoleh nilai *F*-tabel sebesar 3,11, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *F*-hitung ($23,312 > F\text{-tabel } (3,11)$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dinyatakan bahwa *H₀* ditolak dan *H_a* diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu suku bunga riil, PDRB riil, investasi pemerintah dan krisis ekonomi terhadap investasi domestik di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.1 di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi berganda (*R square*) sebesar 0,869 dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat antara variabel suku bunga, PDRB, investasi pemerintah dan dummy (krisis ekonomi) dan kaitannya dengan variabel terikat berupa investasi domestik di Sumatera Barat. Ini ditunjukkan oleh nilai *R square* yang diperoleh sebesar 0,869. Hal ini berarti 86,9% variasi investasi domestik di Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor suku bunga, PDRB, investasi pemerintah dan krisis ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 13,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini.

5.3. Analisis Hasil Uji Asumsi Klasik

Agar diperoleh model yang memenuhi asumsi metode *ordinary least square*, maka dilakukan pengujian asumsi klasik, yaitu Autokorelasi, Multikoleniaritas dan Heterokedastisitas.

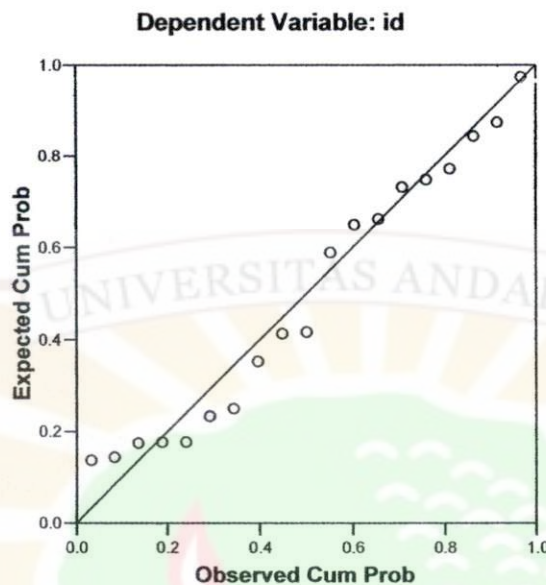
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) pada periode t dengan residual pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson Statistics (DW)* (Gujarati, 2000). Hasil pengujian *DW* tersebut dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 5.1, dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai *DW-test* berada pada daerah $du < DW < 4-du$, yaitu dengan nilai *DW-test* sebesar 2,750 yang artinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi.



Gambar 5.1. Hasil Uji Durbin Watson Test (D-W test)

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Atau dapat dikatakan bahwa heteroskedastisitas adalah variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi lain. Pengujian terhadap heteroskedastisitas dilakukan plot residual yaitu dengan melihat sebaran residual untuk setiap pengamatan terhadap nilai prediksi \hat{Y} . Jika ditemukan plot residual membentuk pola tertentu maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada lampiran dan salah satunya ditunjukkan pada Gambar 5.2. Dari gambar terlihat bahwa residual mengikuti garis plot/ varian residual sama sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas didalam model.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 5.2. Hasil Uji Heterokedasitas .

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian adanya multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan besarnya *tolerance value* dan besarnya *VIF*. Jika nilai *tolerance value* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 5.2.

Secara umum hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 seperti pada tabel 5.2. Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (*VIF*) menunjukkan tidak ada satu pun variabel bebas yang memiliki nilai *VIF* lebih dari 10. Sedangkan koefisien korelasi secara parsial dapat dilihat pada tabel 5.3. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa antara variabel PDRB dan variabel investasi pemerintah diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.879, hal ini berarti bahwa secara

persial terdapat hubungan yang kuat (87,9%) antara variabel PDRB dan variabel investasi pemerintah. Hubungan yang kuat antara kedua variabel ini dicurigai sebagai adanya multikoleniaritas yang disebabkan oleh nilai investasi pemerintah telah termasuk kedalam nilai PDRB riil. Oleh sebab itu salah satu cara untuk mengatasi multikoleniaritas adalah dengan mengeluarkan salah satu variabel yang berkolerasi (Damodar Gujarati, 2000). Dalam hal ini antara variabel PDRB dan investasi pemerintah, yang akan dikeluarkan adalah investasi pemerintah karena variabel PDRB memiliki nilai yang lebih umum digunakan dalam perhitungan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan hasil estimasi variabel terhadap investasi domestik setelah variabel investasi pemerintah dikeluarkan seperti terlihat pada tabel 5.4 dan dengan melakukan analisis yang sama seperti diatas, hasil uji *t* menunjukkan diperoleh bahwa variabel suku bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap investasi domestik dengan nilai *t*-hitung sebesar -2,803 yang lebih kecil dari *t*-tabel $\pm 2,131$ dan signifikan pada $\alpha=5\%$. Variabel PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap investasi domestik dengan nilai *t*-hitung sebesar 4,767 dan signifikan pada $\alpha=1\%$ dan 5% . Sedangkan variabel krisis ekonomi tidak berpengaruh signifikan dengan nilai *t*-hitung sebesar 1,434 dan tidak signifikan pada $\alpha=5\%$ maupun 10% . Hasil uji *F* menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel suku bunga, PDRB dan krisis ekonomi berpengaruh terhadap investasi domestik dengan nilai *F*-hitung sebesar 17,190 yang lebih besar dari *F*-tabel sebesar 3,34 dan nilai sig sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien korelasi berganda (*R square*) yang diperoleh sebesar 0,775. Hal ini berarti 77,5% variasi investasi domestik di Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor suku bunga,

PDRB dan krisis ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 24,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini.

Hasil pengujian asumsi klasik juga memperlihatkan bahwa nilai *DW-test* berada pada daerah $du < DW < 4-du$, yaitu dengan nilai *DW-test* sebesar 2,074 yang artinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Hasil pengujian heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa residual mengikuti garis plot/varian residual sama sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas didalam model (lampiran 5). Hasil pengujian multikoleniaritas menunjukan tidak adanya multikoleniariti diantara variable yang diteliti yang secara umum dapat dilihat dari nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai tolerancenya yang lebih besar dari 0,1. Sedangkan secara parsial terlihat tidak adanya nilai koefisien yang lebih besar dari 0,5. Dapat disimpulkan bahwa Hasil regresi ini telah memenuhi semua pengujian diatas dan model ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dan juga berdasarkan uji validitas asumsi klasik yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kriteria model, *BLUE* (*best, linier, unbiased and estimated*) dapat disimpulkan bahwa model ini telah terhindarkan dari gejala heterokedastisitas, multikolienieritas dan autokorelasi berdasarkan serangkaian pengujian-pengujian yang lazim.

BAB VI

STRATEGI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1. Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan hasil penelitian diatas untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, maka disusun rencana pembangunan investasi dalam bentuk sasaran, arah kebijakan, strategi dan program kegiatan sebagai berikut:

A. Sasaran Peningkatan Investasi Daerah

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dan kondusif sehingga mampu meningkatkan investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi selevel target pertumbuhan ekonomi nasional, dan sekaligus menekan angka pengangguran.
2. Membaiknya citra Provinsi Sumatera Barat sehingga menjadi sebagai salah satu daerah tujuan investasi nasional.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor non migas dengan komposisi produk yang lebih beragam dan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih bersaing.
4. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi, tertib niaga dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis dalam rangka mendukung peningkatan ekspor.

5. Meningkatnya keberterimaan (*acceptance*) produk daerah/nasional di pasar global.

B. Arah Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, maka arah kebijakan bagi peningkatan investasi daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki iklim investasi yang kondusif bagi kegiatan investasi, terutama berkaitan dengan jaminan keamanan dalam berusaha sehingga terjadi peningkatan penanaman modal dalam negeri untuk mendukung pembangunan di bidang sektor ekonomi masyarakat.
- b. Menyempurnakan peraturan-peraturan tentang pengaturan investasi yang bersifat lebih efisien, ekonomis, dan sinergis sehingga dapat menarik minat investor dan terwujudnya kepastian hukum dalam berusaha.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang berhubungan langsung investasi
- d. Meningkatkan pemanfaatan keunggulan sumberdaya lokal, dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan memperhatikan budaya dan adat-istiadat di Provinsi Sumatera Barat.

C. Strategi Peningkatan Investasi Daerah yang ingin dicapai adalah:

Secara internal dapat membentuk iklim investasi yang sehat mencakup:

1. Memperpendek prosedur perizinan investasi menjadi sekitar 30 hari.
2. Menjamin kepastian usaha, dengan menyelesaikan konflik kebijakan antara pusat dan daerah serta konflik kebijakan antar sektor.

3. Menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang penanaman modal daerah.
4. Memberikan insentif penanaman modal yang lebih menarik.
5. Finalisasi konsep revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil.

Secara eksternal adanya peningkatan promosi dan kerjasama investasi mencakup:

1. Melakukan promosi investasi yang terkoordinasi baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Melakukan peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir.
3. Optimalisasi sarana penunjang perdagangan internasional seperti kelembagaan *trade financing* untuk ekspor.
4. Peningkatan keberterimaan (*acceptance*) produk di pasar global melalui pengembangan SNI dan kerjasama standarisasi regional dan internasional.
5. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang untuk tujuan ekspor.
6. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan memfasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana subsistem distribusi lokal.
7. Pengembangan perdagangan berjangka komoditi, pengembangan pasar lelang lokal komoditi agro dan implementasi pembiayaan alternatif melalui sistim resi gudang (WRS= *warehouse receipt system*) untuk mendukung revitalisasi pertanian dan perdagangan.

8. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib ukur, dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa.

Strategi di sektor pariwisata meliputi:

1. Peningkatan strategi dan efektifitas promosi baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Mengembangkan dan meningkatkan jenis dan daya saing produk-produk wisata, yang mempunyai potensi sangat besar, terutama pengembangan wisata bahari dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable*).
3. Meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata.
4. Mensinergikan dan menyederhanakan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata.

D. Program dan Kegiatan

Pembangunan investasi daerah Provinsi Sumatera Barat dapat di jabarkan kedalam program-program berikut :

- Program Peningkatan Daya Saing Iklim dan Realisasi Investasi

Adapun kegiatan – kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi pemerintah terutama dalam membangun sarana prasarana ekonomi, pasar, dan jalan; membentuk unit-unit BUMD yang

bergerak di sektor investasi komersial dan penyertaan modal pada unit-unit yang bergerak di sektor riil.

2. Mengkaji potensi daerah secara terintegrasi khusus antar instansi di daerah kabupaten/kota dan provinsi.
3. Mengembangkan agro-industri seperti industri pengalengan ikan, pengemasan barang, CPO, industri pengolahan gambir, industri pengolahan kakao, industri pengolahan caciava.
4. Pengembangan kebudayaan sebagai daya tarik wisata bertaraf internasional
5. Membuat *spasial economic zone*, yaitu satu kawasan dimana investasi dan perdagangan dilakukan dengan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi investor. Kemudahannya berupa keringanan pajak, memperpendek birokrasi, jaminan keamanan serta kebebasan dalam aktifitas perdagangan internasional.
6. Mengkaji semua peraturan daerah dari Pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota yang ada diwilayah Sumatera Barat
7. Menerapkan sistem pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi bagi investor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2008 tentang pemberian intensif dan kemudahan berinvestasi di daerah berupa (BKPPMD, 2007):
 - a. Keringanan terhadap pajak penghasilan
 - b. Pembebasan atau keringan Bea Masuk Atas Barang Modal.

- c. Pembebasan/ keringan Bea Masuk Atas Bahan Baku/Bahan Baku Penolong untuk keperluan produksi
 - d. Pembebasan atau penangguhan pembayaran PPn atas Barang Modal
 - e. Penyusutan/Ammortisasi yang dipercepat terhadap barang-barang modal yang digunakan dalam proses produksi
 - f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperuntukan khusus bagi bidang usaha tertentu pada wilayah tertentu
 - g. Pembebasan atau penangguhan PPh Badan
8. Melakukan pemantapan Program Pembinaan Penanaman Modal.
 9. Mempersiapkan peraturan daerah penanaman modal sebagai penjabaran dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2001.
 10. Melakukan survei/pendataan Perusahaan PMA/PMDN yang terkena dampak konflik, keamanan dan bencana pasca gempa dan tsunami.
 11. Penyusunan Standar Teknis Pengembangan Penanaman Modal.
 12. Peningkatan Sumberdaya Aparatur tentang Teknis Pelaksanaan dan Pelayanan Penanaman Modal.
 13. Memberikan insentif berupa *tax holiday* bagi investor
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kegiatan – kegiatannya adalah:
 1. Melakukan sosialisasi dan promosi tentang potensi dan peluang investasi di Sumatera Barat.
 2. Melakukan sosialisasi kebijakan penanaman modal.

3. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan propinsi lain dalam pengembangan prosedur dan standar pengkajian Perda.
 4. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk pembiayaan investasi serta dengan pihak swasta.
 5. Mendorong sistem kerjasama investasi yang bisa melibatkan masyarakat secara langsung sehingga saling menguntungkan, serta mencegah masyarakat menanamkan modalnya pada sektor yang kurang produktif.
 6. Melakukan koordinasi Pameran dalam rangka Promosi Investasi.
 7. Kerjasama penyajian data dengan instansi terkait.
 8. Melanjutkan kerjasama ekonomi regional.
 9. Peningkatan promosi daerah dan pengembangan potensi.
 10. Penyebarluasan informasi potensi investasi.
- Program Pengembangan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
 1. Mengoptimalkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 2. Menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang dikemas dalam Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga penanam modal tak mesti harus mencari data kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

6.2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan perkembangan investasi domestik di Sumatera Barat dan implikasinya melalui kebijakan ekonomi makro, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan dan dijaga agar tetap stabil agar investor tidak ragu-ragu untuk menginvestasikan uangnya di Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan beberapa cara antara lain :
 - a. Mengembangkan sektor industri berbasis ekspor dengan teknologi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan yang lebih banyak menggunakan sumber-sumber dalam negeri dibanding bahan baku impor.
 - b. Mengembangkan sektor pariwisata karena memiliki potensi besar namun belum tergarap dan terencana secara integral di wilayah Sumatera Barat, pengembangan sektor pariwisata menjadi pariwisata bertaraf internasional dengan menonjolkan budaya Minangkabau, dan untuk hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
 - c. Mengurangi laju pertumbuhan penduduk, karena laju pertumbuhan penduduk ini sangat mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat. Apabila laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDRB maka berakibat pada rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, dan sebaliknya.
 - d. Meningkatkan tabungan masyarakat karena tabungan ini dapat dijadikan sebagai sumber investasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

2. Pemerintah harus bisa menjaga kestabilan tingkat suku bunga supaya tidak terjadi pelarian modal, misalnya kebijakan dengan menetapkan suku bunga equilibrium (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah) melalui Bank Indonesia. Suku bunga yang tinggi dengan maksud mengurangi laju inflasi dapat menurunkan tingkat investasi, sebaliknya suku bunga yang rendah dengan maksud meningkatkan investasi juga mengakibatkan meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga inflasi juga akan meningkat. Untuk dapat menurunkan tingkat suku bunga menjadi equilibrium diperlukan :

- ✓ Melakukan kebijakan intermediasi sektor keuangan yang memberikan dampak yang signifikan pada sektor riil, sehingga laju inflasi dapat dikontrol.
- ✓ Mengadakan jaminan dari pihak pemerintah terhadap pihak perbankan sehingga pihak perbankan dapat memberikan kelonggaran dan tidak mengutamakan jaminan daripada kelayakan usaha serta tidak memasukan faktor resiko kedalam margin keuntungan sehingga suku bunga bisa jadi lebih rendah.
- ✓ Melakukan Privatisasi BUMN bermasalah yang memicu masalah-masalah baru yang mengancam ekonomi bisnis dan stabilitas politik.

Pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan dalam penetapan suku bunga, namun kebijakan yang dapat dilakukannya adalah dengan cara memperbaiki manajemen pengelolaan dan pelayanan pada lembaga-lembaga keuangan daerah, seperti Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), biaya-biaya peminjaman seperti premi kredit yang

rendah dan biaya administrasi yang kecil, sehingga dapat membantu pengusaha dalam memperoleh kredit investasi dalam waktu yang singkat dan memuaskan.

3. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai penentu kemana arah pembangunan ekonomi diarahkan dengan kewenangan yang dimilikinya, serta terus meningkatkan infrastruktur daerah karena infrastruktur yang baik akan memudahkan investor dalam melakukan investasi di Sumatera Barat dengan cara :
 - a. Merencanakan dengan tepat lokasi pembangunan infrastruktur
 - b. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek sehingga dapat menghasilkan proyek dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
4. Melakukan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional, regional maupun global, menghendaki perubahan paradigma pembangunan ekonomi. Perubahan harus dimulai dengan perubahan Pola Pikir, Pola Sikap dan Pola Tindak agar sesuai dengan standar global yang menghendaki kualifikasi tinggi.

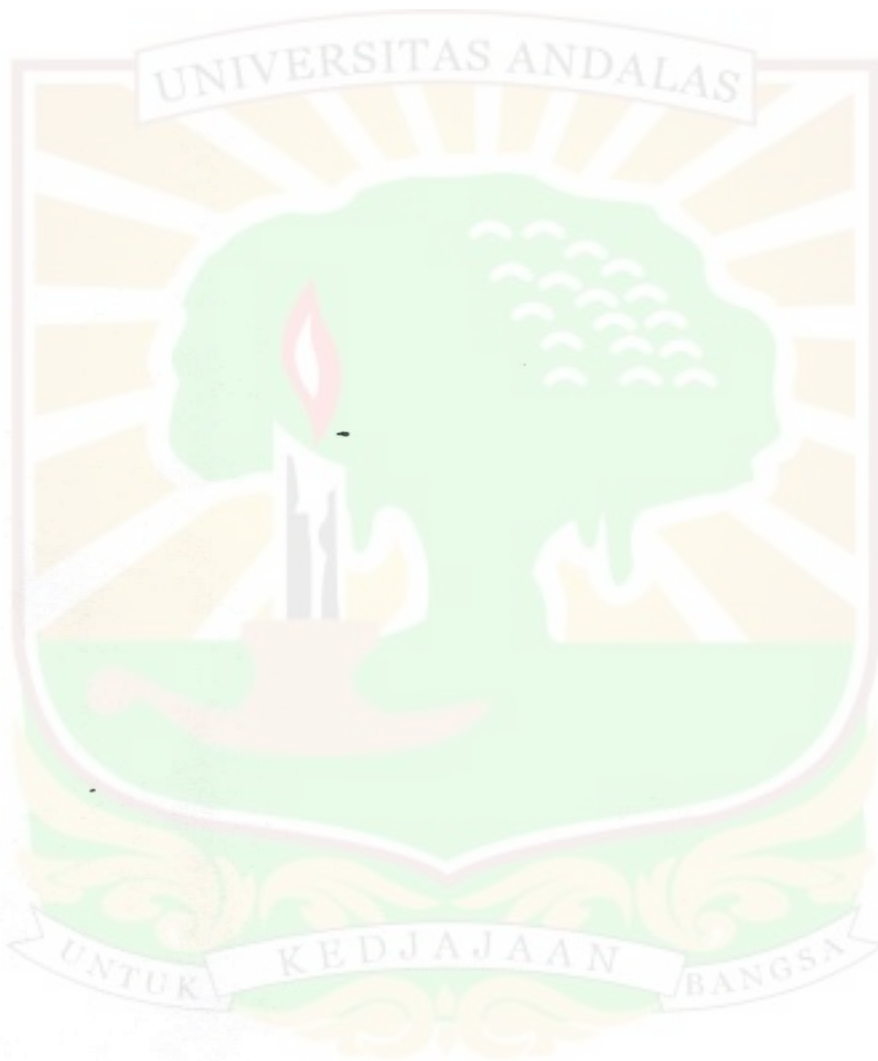
BAB VII

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai investasi domestik di Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat suku bunga, dan krisis ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap investasi domestik di Sumatera Barat.
2. Hasil pengujian secara individual terhadap faktor - faktor yang mempengaruhi investasi domestik di Sumatera Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Hasil pengujian menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap investasi domestik di Sumatera Barat. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya suku bunga kredit dapat dipandang sebagai naiknya harga uang yang menyebabkan semakin berkurangnya minat investor mengambil kredit untuk menghindari tekanan biaya bunga karena tingkat bunga merupakan komponen biaya modal yang utama.
 - b. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap investasi domestik di Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa peningkatan PDRB akan meningkatkan investasi domestik di Sumatera Barat.
 - c. Hasil pengujian menunjukkan bahwa investasi pemerintah memiliki multikoleniaritas yang kuat dengan variabel PDRB. Hal ini disebabkan oleh dalam variabel PDRB sudah termasuk nilai investasi pemerintah. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasinya adalah dengan mengeluarkan variabel investasi pemerintah dari model.

- d. Hasil pengujian menunjukkan bahwa krisis ekonomi (*Dummy*) tidak mempunyai pengaruh negatif yang kuat terhadap investasi domestik di Sumatera Barat. Jadi adanya krisis ekonomi hanya akan berpengaruh kecil terhadap investasi domestik di Sumatera Barat.



DAFTAR PUSTAKA

- Antara, Made. (Jurnal) Kebutuhan Investasi Sektor Basis Dan Non Basis Dalam Perekonomian Regional Bali. Bali.
- Arsyad, Lincoln. 1999. 'Ekonomi Pembangunan'. Edisi keempat, BPFE Yogyakarta
- Arief, Sritua, (1998), "Teori dan Kebijakan Pembangunan", PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta
- Asian Development Bank. 2003. Jalan Menuju Pemulihan: Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia. Jakarta: Asian Development Bank.
- Axioma, Aranyaka Dananjaya, 2004. (Jurnal) Globalisasi Dalam Kerangka WTO Dan Implikasinya Terhadap Sektor Pariwisata Nasional Bogor.
- Baasir, F. 2003. Pembangunan dan Crisis. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Bachtiar, Nasri. 2004. (Jurnal) Permintaan Industri Manufaktur Terhadap Tenaga Kerja Mahir di Indonesia. Fak. Ekonomi Unand. Padang.
- Bappeda. 2008. Sumatera Barat Dalam Angka . Padang.
- Bappeda, 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat. Padang
- Barro. J Robert (1995). *Economic Growth*. Mc. Graw-Hill. New York.
- BI. (2005). Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Barat. Padang
- BI. (2005). Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat. Padang.
- BPS. Indikator Ekonomi Propinsi Sumatera Barat. Padang.
- BPS. Sumatera Barat Dalam Angka. Padang.(beberapa tahun periode).
- Brago, Marcelo, Nonnemberg. 2004. *The Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries*. Instituto de Pesw\quisa Economica Aplicada.
- Chervin, Michal. (2009). *Economic Growth and the Volatility of Foreign Aid*. University of Amsterdam.

- DPR-RI. 2005. Laporan Hasil kunjungan kerja komisi VI DPR-RI ke Sumatera Barat. Jakarta.
- Elfindri. 2004. Ekonomi Ketenagakerjaan. Universitas Andalas. Padang.
- Elita. 2008. Analisis kontribusi tenaga kerja dan investasi terhadap nilai produksi industri kecil di Sumatera Barat. Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
- Ferlini. 2006. Analisis ketenagakerjaan dan strategi peningkatan kesempatan kerja di Propinsi Sumatera Barat. Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
- Feri. (2007). Prospek dan kendala peningkatan investasi di Sumatera Barat sudut pandang dunia usaha. Padang.
- Firmansyah, Dadang. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia periode 1985-2004. UII Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar. 2000. Ekonometrika Dasar. Erlangga. Jakarta.
- Jhingan, M.L. (2000). Ekonomi pembangunan dan Perencanaan. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Jogiyanto. (2003). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi ketiga. BPFE UGM Yogyakarta
- Kadin. (2007). Pandangan Umum Tentang Investasi di Sumatera Barat. Padang.
- Kadin Indonesia (2009). Kebijakan Pemerintah. Suara Karya Online.
- Lains, Alfian. (1994). Ekonometrika; Teori dan Aplikasi. Pusat antar universitas bidang ilmu ekonomi UI. Depok.
- Mankiw, N Gregory. (2003). Teori Makroekonomi. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Muslim. 2005. Faktor-Faktor yang mempengaruhi investasi pada sektor industri (studi kasus industri pengolahan besar dan sedang di Propinsi Sumatera Barat). Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
- Nusantara, Agung. 2001. Analisis Peranan Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Journal Bisnis dan Ekonomi. STIE Stikubang Semarang.
- Reksoprayitno, S., 2000, Pengantar Ekonomi Makro, Edisi 6, BPFE, Yogyakarta.

- Reinikka, R., dan Svensson, J., 1999, "*How Inadequate Provision of Public Infrastructure and Services Affects Private Investment*", Policy Research Working Paper, The World Bank.
- Setyowati, Eni, dkk. 2007. Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan. Journal Ekonomi Pembangunan Vol 8 No. 1 Juni 2007. Lembaga Penelitian ekonomi. Surakarta.
- Shiimi, Ipumbu, W., and Kadhikwa, Gerson. 1999. *Saving and Investment in Namibia*. Research Department bank of Namibia.
- Silalahi, Irrene. 2002. Pengaruh Investasi PMDA dan PMDN terhadap penciptaan Lapangan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Pascasarjana USU.
- Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Baduose Media. Padang.
- Sjafrizal. 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media. Padang.
- Stanley, Fisher (1991). *Makroekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2002). Pengantar Teori Ekonomi Makro. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sodik, Jamzami, dan Nuryadin, Didi. 2005. Determinan Investasi di Daerah : Studi Kasus Propinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi 1 Edisi kelima. Jakarta.
- Wijaya, F., 1999, Ekonomikamakro, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.
- World Bank (1994). *Makroeconomic Policies, Crises and Long Term Growth in Indonesia 1965-1990*.
- (2008). Survei Faktor-Faktor Non Ekonomi yang Mempengaruhi Iklim Investasi di Sulsel. LPER Sulsel.
- <http://www.antaranews.com> Ekonomi Namibia Tumbuh Lagi Karena Berlian Kembali Berkilau. Kamis, 24 Juni 2010 01:22 WIB
- <http://www.kompas.co.id>. Namibia Bukan Tujuan Akhir. Kamis, 24 Juli 2010

Lampiran 1. PDRB Propinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 1990- 2008 berdasarkan harga konstan tahun 2000

Tahun	LAPANGAN USAHA										Jumlah PDRB
	PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN & BUDIDAYA PERAIRAN	PERTAMBANGAN & PENGGAJIAN	INDUSTRI PENGOLAHAN	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	BANGUNAN	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA BUDIDAYA PERAIRAN	JASA - JASA		
1990	3,663,143.19	521,368.88	1,631,896.41	51,835.48	1,188,450.23	2,634,542.42	1,440,689.79	991,220.38	2,452,905.48	14,205,352.45	
1991	3,875,833.45	518,384.41	1,838,168.11	54,604.05	2,337,084.26	2,751,218.67	1,512,840.89	1,036,276.36	2,659,672.26	15,083,145.25	
1992	4,105,393.92	556,008.21	2,019,411.49	56,826.71	1,300,867.52	2,956,292.92	1,623,989.88	1,089,515.26	2,872,798.76	16,179,638.26	
1993	4,297,455.74	621,214.48	2,211,457.51	60,550.09	1,378,399.21	3,235,766.54	1,823,441.88	1,130,188.53	3,163,749.35	17,523,876.30	
1994	4,495,344.15	775,971.66	2,439,114.51	70,867.23	1,448,329.15	3,478,385.36	1,963,683.02	1,206,708.15	3,273,482.75	18,829,216.90	
1995	4,851,691.84	924,424.64	2,738,732.83	89,423.89	1,581,432.78	3,703,823.97	2,187,522.96	1,246,074.13	3,437,959.12	20,511,492.33	
1996	5,191,019.37	981,689.54	3,061,416.17	111,499.14	1,740,412.26	3,974,180.59	2,367,841.39	1,286,000.28	3,638,799.86	22,126,471.56	
1997	5,266,836.97	1,081,145.89	3,252,604.11	146,749.63	1,812,796.15	4,110,086.96	2,604,094.91	1,316,168.54	3,787,659.13	23,263,994.76	
1998	5,190,843.26	966,136.36	2,952,688.36	160,290.78	1,170,341.21	3,901,892.49	2,376,560.24	1,177,088.93	3,856,572.45	21,697,860.80	
1999	5,356,277.58	870,255.57	3,011,686.81	183,725.08	1,087,974.75	3,985,298.02	2,512,376.54	1,115,489.26	3,974,438.10	22,042,474.89	
2000	5,385,595.71	873,887.57	3,218,470.01	210,962.36	1,131,101.81	4,147,024.46	2,650,332.56	1,164,508.32	4,107,731.25	22,889,614.05	
2001	5,648,004.31	868,572.82	3,318,632.53	243,639.82	1,157,117.15	4,332,173.04	2,749,038.34	1,204,302.67	4,205,893.26	23,727,373.93	
2002	6,091,915.61	884,878.74	3,404,309.81	271,084.90	1,194,839.17	4,543,977.61	2,928,943.45	1,230,509.41	4,289,729.05	24,840,187.76	
2003	6,557,510.72	894,245.03	3,472,186.00	284,293.97	1,278,358.43	4,755,166.34	3,165,005.33	1,294,725.54	4,445,290.27	26,146,781.63	
2004	6,937,172.92	923,379.06	3,629,455.70	301,070.70	1,375,769.34	5,006,640.27	3,419,244.73	1,376,937.70	4,608,466.15	27,578,136.58	
2005	7,293,205.65	951,882.62	3,808,287.01	338,722.91	1,440,337.57	5,305,757.20	3,754,819.83	1,464,102.75	4,802,365.00	29,159,480.54	
2006	7,658,394.83	980,826.77	3,978,641.07	368,981.69	1,544,889.64	5,662,879.36	4,140,569.92	1,579,347.52	5,035,414.31	30,949,945.10	
2007	8,038,919.12	1,028,828.26	4,209,069.40	394,432.98	1,627,195.26	6,056,682.55	4,526,737.30	1,692,546.42	5,338,557.30	32,912,968.59	
2008										35,007,921.57	
Rata-rata											

Sumber : PDRB Sumatera Barat dan Sumatera Barat Dalam Angka beberapa tahun terbit

Lampiran 2. Laju pertumbuhan PDRB Prop. Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 1990- 2008 berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Tahun	Sektor Perekonomian								
	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	Pertambangan & Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan	Perdagangan, Hotel & Restoran	Pengangkutan & Komunikasi	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	Jasa - jasa
1990	5,57	9,76	15,89	7,28	7,43	10,48	2,29	3,97	7,10
1991	5,81	(0,57)	12,64	5,34	96,65	4,43	5,01	4,55	8,43
1992	5,92	7,26	9,86	4,07	(44,34)	7,45	7,35	5,14	8,01
1993	4,68	11,73	9,51	6,55	5,96	9,45	12,28	3,73	10,13
1994	4,60	24,91	10,29	17,04	5,07	7,50	7,69	6,77	3,47
1995	7,93	19,13	12,28	26,19	9,19	6,48	11,40	3,26	5,02
1996	6,99	6,19	11,78	24,69	10,05	7,30	8,24	3,20	5,84
1997	1,46	10,13	6,25	31,62	4,16	3,42	9,98	2,35	4,09
1998	(1,44)	(10,64)	(9,22)	9,23	(35,44)	(5,07)	(8,74)	(10,57)	1,82
1999	3,19	(9,92)	2,00	14,62	(7,04)	2,14	5,71	(5,23)	3,06
2000	0,55	0,42	6,87	14,83	3,96	4,06	5,49	4,39	3,35
2001	4,87	(0,61)	3,11	15,49	2,30	4,46	3,72	3,42	2,39
2002	7,86	1,88	2,58	11,26	3,26	4,89	6,54	2,18	1,99
2003	7,64	1,06	1,99	4,87	6,99	4,65	8,06	5,22	3,63
2004	5,79	3,26	4,53	5,90	7,62	5,29	8,03	6,35	3,67
2005	5,13	3,09	4,93	12,51	4,69	5,97	9,81	6,33	4,21
2006	5,01	3,04	4,47	8,93	7,26	(30,96)	10,27	7,87	4,85
2007	4,97	4,89	5,79	6,90	5,33	65,35	9,33	7,17	6,02
2008	4,96	5,10	6,06	3,33	6,88	6,70	8,61	6,99	6,55
	4,81	4,74	6,40	12,14	5,26	6,53	6,90	3,53	4,93

Sumber : PDRB Sumatera Barat dan Sumatera Barat Dalam Angka beberapa tahun terbit

LAMPIRAN 3. HASIL REGRESI LINEAR

No.	Tahun	Indeks Investasi Domestik th 2000=100	Tingkat suku bungakredit bank umum (%)	PDRB konstan (th 2000=100) (Rp.000.000.000)	Indeks Investasi Pemerintah th 2000=100	dummy
1	1990	54.83	12.21	14,205.35	23.57	0
2	1991	99.26	9.55	15,083.15	27.33	0
3	1992	122.41	16.29	16,179.64	29.21	0
4	1993	142.70	7.78	17,523.88	33.01	0
5	1994	92.96	6.23	18,829.22	38.64	0
6	1995	136.36	7.39	20,511.49	46.58	0
7	1996	108.69	10.17	22,126.47	61.06	0
8	1997	224.30	6.62	23,263.99	62.78	1
9	1998	365.01	-61.00	21,697.86	54.14	1
10	1999	185.35	13.57	22,042.47	78.53	1
11	2000	100.00	5.87	22,889.61	100.00	0
12	2001	97.98	8.04	23,727.37	111.96	0
13	2002	185.45	7.60	24,840.19	111.46	0
14	2003	108.89	10.13	26,146.78	194.39	0
15	2004	336.43	7.07	27,578.14	560.67	0
16	2005	323.30	-4.81	29,159.48	636.87	1
17	2006	264.03	7.05	30,949.95	649.61	0
18	2007	311.60	6.11	32,912.97	562.60	0
19	2008	324.29	1.72	35,007.92	668.10	1

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	d, ip, sb, pdrb(a)		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: id

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.932(a)	.869	.832	41.49714	.869	23.312	4	14	.000

a. Predictors: (Constant), d, ip, sb, pdrb

b. Dependent Variable: id

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	160576.780	4	40144.195	23.312	.000(a)
	Residual	24108.171	14	1722.012		
	Total	184684.951	18			

a. Predictors: (Constant), d, ip, sb, pdrb

b. Dependent Variable: id

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	121.861	70.538		1.728	.106	-29.427	273.149					
	sb	-2.602	.686	-.420	-3.793	.002	-4.073	-1.131	-.552	-.712	-.366	.760	1.316
	pdrb	.000	.004	.016	.077	.940	-.008	.008	.712	.021	.007	.206	4.854
	ip	.258	.081	.662	3.188	.007	.084	.431	.731	.649	.308	.217	4.618
	d	54.987	25.903	.246	2.123	.052	-.570	110.543	.581	.493	.205	.697	1.436

a. Dependent Variable: id

Coefficient Correlations(a)

Model		d	ip	sb	pdrb
1	Correlations				
	d	1.000	.098	.467	-.222
	ip	.098	1.000	-.077	-.879
	sb	.467	-.077	1.000	.040
	Covariances				
	d	670.963	-.879	.040	1.000
	ip	.205	.205	8.301	-.021
	sb	8.301	.007	-.004	.000
	pdrb	-.021	.000	.470	.000
				.000	.000

a. Dependent Variable: id

UNIVERSITAS ANDALAS

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	sb	pdrb	ip	d
1	1	3.035	1.000	.00	.00	.00	.01	.03
	2	1.229	1.571	.00	.41	.00	.00	.12
	3	.405	2.739	.00	.17	.00	.18	.32
	4	.325	3.055	.01	.41	.00	.05	.50
	5	.007	21.056	.98	.00	1.00	.76	.04

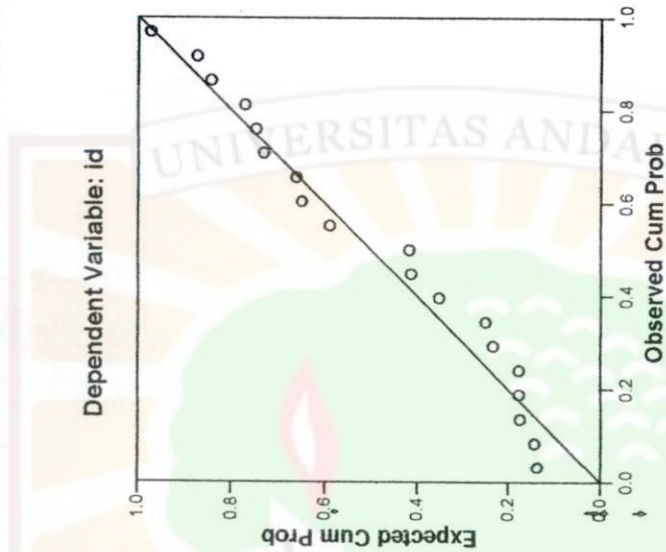
a Dependent Variable: id

Residuals Statistics(a)

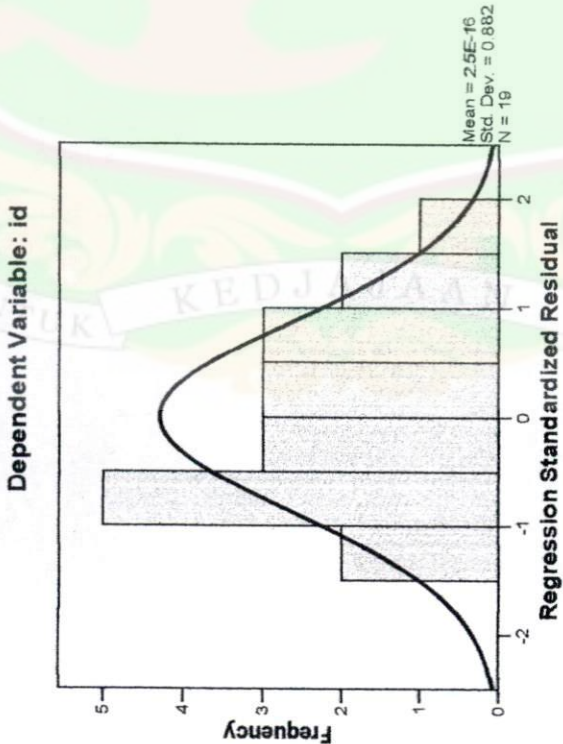
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	91.5779	361.7502	188.6232	94.45069	19
Residual	-45.35194	80.66325	.00000	36.59703	19
Std. Predicted Value	-1.027	1.833	.000	1.000	19
Std. Residual	-1.093	1.944	.000	.882	19

a Dependent Variable: id

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram



LAMPIRAN 4. HASIL REGRESI DALAM BENTUK SEMILINEAR

No.	Tahun	Ln Investasi Domestik	Tingkat suku bunga deposito 12 bln (%)	Ln PDRB	Ln Investasi Pemerintah	inflasi (%)	dummy
1	1990	25.36	12.21	30.28	24.04	6.74	0
2	1991	25.95	9.55	30.34	24.19	11.32	0
3	1992	26.16	16.29	30.41	24.26	2.92	0
4	1993	26.31	7.78	30.49	24.38	9.28	0
5	1994	25.89	6.23	30.57	24.54	8.73	0
6	1995	26.27	7.39	30.65	24.72	8.36	0
7	1996	26.04	10.17	30.73	24.99	6.25	0
8	1997	26.77	6.62	30.78	25.02	10.72	1
9	1998	27.25	-61.00	30.71	24.87	87.2	1
10	1999	26.58	13.57	30.72	25.24	4.23	1
11	2000	25.96	5.87	30.76	25.49	10.99	0
12	2001	25.94	8.04	30.80	25.60	9.86	0
13	2002	26.58	7.60	30.84	25.59	10.22	0
14	2003	26.04	10.13	30.89	26.15	5.55	0
15	2004	27.17	7.07	30.95	27.21	6.98	0
16	2005	27.13	-4.81	31.00	27.34	20.47	1
17	2006	26.93	7.05	31.06	27.36	8.05	0
18	2007	27.10	6.11	31.12	27.38	6.9	0
19	2008	27.13	1.72	31.19	27.39	12.68	1

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	d, ip, sb, pdrb(a)		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: id

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	df1	df2
1	.873(a)	.762	.695	.30817	.762	11.233	4	14

a. Predictors: (Constant), d, ip, sb, pdrb

b. Dependent Variable: id

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.267	4	1.067	11.233	.000(a)
	Residual	1.330	14	.095		
	Total	5.596	18			

a. Predictors: (Constant), d, ip, sb, pdrb

b. Dependent Variable: id

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.695	22.573		.607	.554	-34.718	62.109					
	sb	-.011	.005	-.308	-2.046	.060	-.022	.001	-.473	-.480	-.267	.748	1.336
	pdrb	.203	.873	.093	.233	.819	-1.670	2.076	.732	.062	.030	.106	9.456
	ip	.253	.180	.548	1.403	.182	-.134	.639	.703	.351	.183	.111	8.995
	d	.350	.194	.284	1.808	.092	-.065	.765	.574	.435	.236	.688	1.453

a. Dependent Variable: id

Coefficient Correlations(a)

Model		d	ip	sb	pdrb
1	Correlations	d	.153	.437	-.240
		ip	1.000	-.153	-.940
		sb	-.153	1.000	.133
		pdrb	-.940	.133	1.000
	Covariances	d	.037	.000	-.041
		ip	.005	.000	-.148
		sb	.000	.000	.001
		pdrb	-.041	.001	.763

a. Dependent Variable: id

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimensio n	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	sb	pdrb	ip	d
1	1	3.380	1.000	.00	.00	.00	.00	.02
	2	1.243	1.649	.00	.37	.00	.00	.13
	3	.376	2.997	.00	.60	.00	.00	.75
	4	.001	53.762	.00	.01	.00	.13	.04
	5	.000	918.518	1.00	.02	1.00	.87	.06

a. Dependent Variable: id

Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	25.7916	27.3002	26.4505	.48688	19
Residual	-.43160	.38755	.00000	.27178	19
Std. Predicted Value	-1.353	1.745	.000	1.000	19
Std. Residual	-1.401	1.258	.000	.882	19

a. Dependent Variable: id

LAMPIRAN 5. HASIL REGRESI SETELAH VARIABEL INVESTASI PEMERINTAH DIKELUARKAN

No.	Tahun	Indeks Investasi Domestik th 2000=100	Tingkat suku bungakredit bank umum (%)	PDRB konstan (th 2000=100) (Rp.000.000.000)	dummy
1	1990	54.83	12.21	14,205.35	0
2	1991	99.26	9.55	15,083.15	0
3	1992	122.41	16.29	16,179.64	0
4	1993	142.70	7.78	17,523.88	0
5	1994	92.96	6.23	18,829.22	0
6	1995	136.36	7.39	20,511.49	0
7	1996	108.69	10.17	22,126.47	0
8	1997	224.30	6.62	23,263.99	1
9	1998	365.01	-61.00	21,697.86	1
10	1999	185.35	13.57	22,042.47	1
11	2000	100.00	5.87	22,889.61	0
12	2001	97.98	8.04	23,727.37	0
13	2002	185.45	7.60	24,840.19	0
14	2003	108.89	10.13	26,146.78	0
15	2004	336.43	7.07	27,578.14	0
16	2005	323.30	-4.81	29,159.48	1
17	2006	264.03	7.05	30,949.95	0
18	2007	311.60	6.11	32,912.97	0
19	2008	324.29	1.72	35,007.92	1

Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	d, pdrb, sb(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: id

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.880(a)	.775	.730	52.67155	.775	17.190	3	15	.000

a Predictors: (Constant), d, pdrb, sb

b Dependent Variable: id

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	143070.57	3	47690.191	17.190	.000(a)
	Residual	41614.379	15	2774.292		
	Total	184684.95	18			

a Predictors: (Constant), d, pdrb, sb

b Dependent Variable: id

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)											
	sb	51.806		-1.188	.253	-171.991	48.853	-.552	-.586	-.343	.764	1.308
	pdrb	.868	-.393	-2.803	.013	-4.283	-.583	.712	.776	.584	.909	1.100
	d	.002	.613	4.767	.000	.006	.015	.581	.347	.176	.703	1.422
		32.721	.210	1.434	.172	-22.829	116.656					

a. Dependent Variable: id

Coefficient Correlations(a)

Model			d	pdrb	sb
1	Correlations	d	1.000	-.288	.478
		pdrb	-.288	1.000	-.059
		sb	.478	-.059	1.000
	Covariances	d	1070.645	-.021	13.590
		pdrb	-.021	.000	.000
		sb	13.590	.000	.753

a. Dependent Variable: id

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	sb	pdrb	d
1	1	2.405	1.000	.01	.00	.01	.04
	2	1.228	1.400	.00	.41	.00	.11
	3	.340	2.659	.02	.58	.01	.80
	4	.027	9.451	.97	.00	.98	.04

a Dependent Variable: id

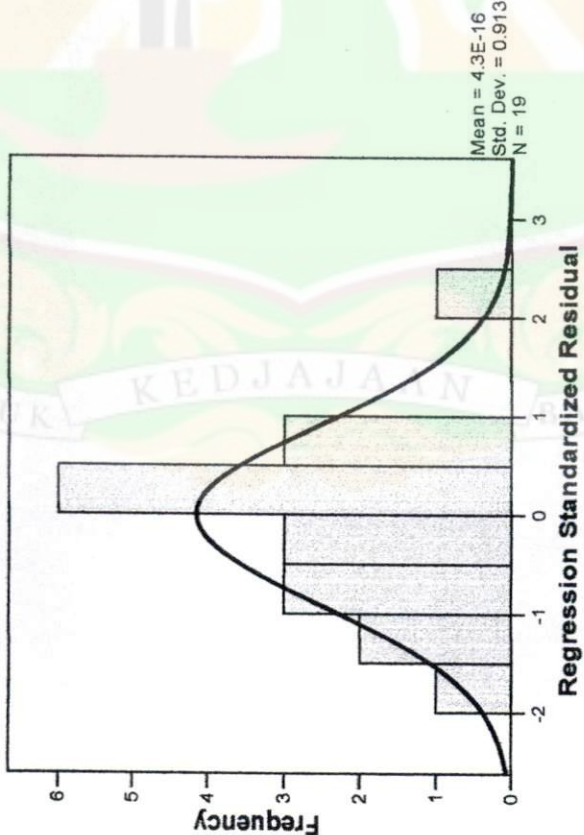
Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	59.1215	363.4576	188.6232	89.15360	19
Residual	-81.71662	123.22535	.00000	48.08232	19
Std. Predicted Value	-1.453	1.961	.000	1.000	19
Std. Residual	-1.551	2.340	.000	.913	19

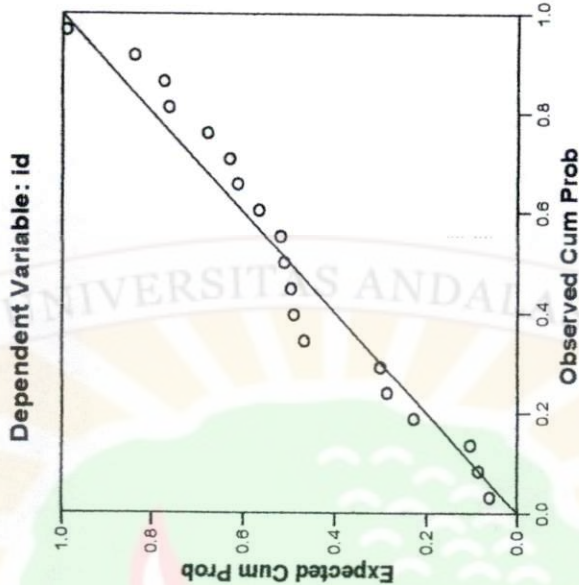
a Dependent Variable: id

Histogram

Dependent Variable: id



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



LAMPIRAN 6. JENIS PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (ONE STOP SERVICE)

No	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Pelayanan
1	Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Usaha (HO)	5 hari
2	Izin Reklame	5 hari
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	10 hari
4	Izin Usaha Industri (IUI)	7 hari
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	7 hari
6	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 hari
7	Izin Usaha Rumah Makan, Hotel dan Penginapan (IURMHP)	5 hari
8	Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal.	30 hari
9	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	3 hari
10	Tanda Daftar Industri(TDI).	5 hari
11	Tanda Daftar Gudang (TDG).	5 hari
12	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).	2 hari
13	Surat Persetujuan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).	10 hari
14	Surat Persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	100 hari
15	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)	5 hari
16	Izin Penggunaan Kapal Perikanan	5 hari
17	Izin Rumah Potong Hewan.	7 hari
18	Izin Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	7 hari
19	Izin Usaha Salon Kecantikan	5 hari
20	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	7 hari
21	Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C	14 hari
22	Izin Penyelenggaraan Wisata	5 hari
23	Izin Apotek	14 hari
24	Izin Toko Obat	14 hari
25	Izin Bidan/Perawat	14 hari
26	Izin Praktek Fisioterapi	14 hari
27	Pendaftaran Pengobatan Tradisional/Alternatif	14 hari
28	Pendaftaran Pabrik Obat Tradisional	14 hari
29	Izin Pusat Kebugaran	14 hari
30	Rekomendasi Rumah Sakit Swasta	14 hari
31	Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin	14 hari
32	Izin Praktek Tukang Gigi	14 hari
33	Izin Optik	14 hari
34	Izin Penangkapan Ikan	5 hari
35	Izin Pembudidayaan Ikan	5 hari
36	Izin Penyimpanan/Penampungan/Pengolahan/Pengawetan Ikan	7 hari